

Perempuan Pekerja Migran

Catatan Jurnal Perempuan

Perempuan Pekerja Migran

Artikel

Dimensi Kerentanan Perempuan Pekerja Migran di Tengah Disrupsi Perkembangan Industri dan Pandemi

Yovi Arista, Zulyani Evi, Wahyu Susilo

Perlindungan Perempuan Pekerja Migran: Pembaharuan Hukum yang Tertunda

Sulistiyowati Irianto

Analisis Gender Program Ekonomi Produktif untuk Perempuan Purna Pekerja Migran:

Studi Kasus di Desa Kenanga, Kabupaten Indramayu

Andi Misbahul Pratiwi, Yusmiati Vistamika Wangka, Andi Nur Faizah

Kerentanan Pekerja Migran Terhadap Ekstremisme Kekerasan: Studi Kasus Perempuan

Purna Pekerja Migran Indonesia di Hong Kong

Aris Arif Mundayat, Wahyu Susilo, Zulyani Evi

Perdagangan Perempuan dan Anak di Nusa Tenggara Timur sebagai Kekalahan Komunitas Subsisten terhadap Ekonomi Pasar Tenaga Kerja Migran

Domingus Elcid Li

Persaudarian Purna Migran: Studi Kasus Program 'Desbumi' dan 'Desmigratif' di Kabupaten Wonosobo

Zulyani Evi, Yovi Arista, Safina Maulida, Arief Rahadian

Diterbitkan oleh:

YAYASAN
YJP
JURNAL
PEREMPUAN

Yayasan Jurnal Perempuan
No. Akreditasi: 36/E/KPT/2019

Gerakan 1000 Sahabat Jurnal Perempuan

Pemerhati Jurnal Perempuan yang baik,

Jurnal Perempuan (JP) pertama kali terbit dengan nomor 01 Agustus/September 1996 dengan harga jual Rp 9.200,-. Jurnal Perempuan hadir di publik Indonesia dan terus-menerus memberikan yang terbaik dalam penyajian artikel-artikel dan penelitian yang menarik tentang permasalahan perempuan di Indonesia.



Tahun 1996, Jurnal Perempuan hanya berolah kurang dari seratus eksemplar yang didistribusikan sebagian besar secara gratis untuk dunia akademisi di Jakarta. Kini, oplah Jurnal Perempuan berkisar 3000 eksemplar dan didistribusikan ke seluruh Indonesia ke berbagai kalangan mulai dari perguruan tinggi, asosiasi profesi, guru-guru sekolah, anggota DPR, pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan kalangan umum seperti karyawan dan ibu rumah tangga.

Kami selalu hadir memberikan pencerahan tentang nasib kaum perempuan dan kelompok minoritas lainnya melalui kajian gender dan feminisme. Selama perjalanan hingga tahun ini, kami menyadari betapa sangat berat yang dihadapi kaum perempuan dan betapa kami membutuhkan bantuan semua kalangan termasuk laki-laki untuk peduli pada perjuangan perempuan karena perjuangan ini.

Jurnal Perempuan menghimbau semua orang yang peduli pada Jurnal Perempuan untuk membantu kelangsungan penerbitan, penelitian dan advokasi Jurnal Perempuan. Tekad kami adalah untuk hadir seterusnya dalam menyajikan penelitian dan bacaan-bacaan yang bermanfaat untuk masyarakat Indonesia dan bahkan suatu saat dapat merambah pembaca internasional. Kami berharap anda mau membantu mewujudkan cita-cita kami.

Bila anda percaya pada investasi bacaan bermutu tentang kesetaraan dan keadilan dan peduli pada keberadaan Jurnal Perempuan, maka, kami memohon kepada publik untuk mendukung kami secara finansial, sebab pada akhirnya Jurnal Perempuan memang milik publik. Kami bertekad menggalang 1000 penyumbang Jurnal Perempuan atau 1000 Sahabat Jurnal Perempuan. Bergabunglah bersama kami menjadi penyumbang sesuai kemampuan anda:

- SJP Mahasiswa S1 : Rp 150.000,-/tahun
- SJP Silver : Rp 300.000,-/tahun
- SJP Gold : Rp 500.000,-/tahun
- SJP Platinum : Rp 1.000.000,-/tahun
- SJP Company : Rp 10.000.000,-/tahun

Formulir dapat diunduh di <http://www.jurnalperempuan.org/sahabat-jp.html>

Anda akan mendapatkan terbitan-terbitan Jurnal Perempuan secara teratur, menerima informasi-informasi kegiatan Jurnal Perempuan dan berita tentang perempuan serta kesempatan menghadiri setiap event Jurnal Perempuan.

Dana dapat ditransfer langsung ke bank berikut data pengirim, dengan informasi sebagai berikut:

**- Bank Mandiri Cabang Jatipadang atas nama Yayasan Jurnal Perempuan Indonesia
No. Rekening 127-00-2507969-8**

(Mohon bukti transfer diemail ke ima@jurnalperempuan.com)

Semua hasil penerimaan dana akan dicantumkan di website kami di: **www.jurnalperempuan.org**

Informasi mengenai donasi dapat menghubungi Himah Sholihah (Hp 081807124295,
email: ima@jurnalperempuan.com).

Sebagai rasa tanggung jawab kami kepada publik, sumbangan anda akan kami umumkan pada tanggal 1 setiap bulannya di website kami www.jurnalperempuan.org dan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Yayasan Jurnal Perempuan.

Salam pencerahan dan kesetaraan,

Gadis Arivia

(Pendiri Jurnal Perempuan)



ISSN 1410-153X

PENDIRI

Dr. Gadis Arivia
Prof. Dr. Toeti Heraty Noerhadi-Roosseno
Ratna Syafrida Dhanny
Asikin Arif (Alm.)

DEWAN PEMBINA

Dr. Gadis Arivia
Prof. Dr. Toeti Heraty Noerhadi-Roosseno
Mari Elka Pangestu, Ph.D.
Svida Alisjahbana

DIREKTUR & PEMIMPIN REDAKSI

Dr. Atnike Nova Sigiro

DEWAN REDAKSI

Prof. Dr. Sulistyowati Irianto (Antropologi Hukum Feminisme, Universitas Indonesia)
Prof. Sylvia Tiwon (Antropologi Gender, University California at Berkeley)
Prof. Saskia Wieringa (Sejarah Perempuan & Queer, Universiteit van Amsterdam)
Prof. Dr. Musdah Mulia (Pemikiran Politik Islam & Gender, UIN Syarif Hidayatullah)
Dr. Nur Iman Subono (Politik & Gender, FISIPOL Universitas Indonesia)
Mariana Amiruddin, M.Hum (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan)
Yacinta Kurniasih, M.A. (Sastra dan Perempuan, Faculty of Arts, Monash University)
Soe Tjen Marching, Ph.D (Sejarah dan Politik Perempuan, SOAS University of London)
Dr. Andi Achdian (Sejarah & Sosiologi, Universitas Nasional)

MITRA BESTARI

Prof. Mayling Oey-Gardiner (Demografi & Gender, Universitas Indonesia)
David Hulse, PhD (Politik & Gender, Former Regional Representative Ford Foundation Jakarta)
Dr. Pinky Saptandari (Politik & Gender, Universitas Airlangga)
Dr. Kristi Poerwandari (Psikologi & Gender, Universitas Indonesia)
Dr. Ida Ruwaida Noor (Sosiologi Gender, Universitas Indonesia)
Katharine McGregor, PhD. (Sejarah Perempuan, University of Melbourne)
Dr. (iur) Asmin Fransiska, SH, LLM (Hukum & Hak Asasi Manusia, Universitas Katolik Atma Jaya, Jakarta)
Dr. Irene Hadiprayitno (Hak Asasi Manusia & Hubungan Internasional, Leiden University)
Prof. Jeffrey Winters (Politik & Gender, Northwestern University)
Ro'fah, PhD. (Agama & Gender, UIN Sunan Kalijaga)
Tracy Wright Webster, PhD. (Gender & Cultural Studies, University of Western Australia)
Prof. Kim Eun Shil (Antropologi & Gender, Korean Ewha Womens University)
Prof. Merlyna Lim (Media, Teknologi & Gender, Carleton University)
Prof. Claudia Derichs (Politik & Gender, Universitaet Marburg)

Sari Andajani, PhD. (Antropologi Medis, Kesehatan Masyarakat & Gender, Auckland University of Technology)
Dr. Wening Udasmoro (Budaya, Bahasa & Gender, Universitas Gajah Mada)
Prof. Ayami Nakatani (Antropologi & Gender, Okayama University)
Dr. Antarini Pratiwi Arna (Hukum & Gender, Indonesian Scholarship and Research Support Foundation)
Dr. Widjajanti M Santoso (Gender, Sosiologi & Media, Indonesian Institute of Sciences)
Dr. Lidwina Inge Nurtjahyo (Hukum & Gender, Universitas Indonesia)
Dr. Bagus Takwin (Psikologi & Gender, Universitas Indonesia)
Ikhaputri Widiyanti, M. Si. (Filsafat dan Feminisme, Universitas Indonesia)
Elisabet Kuswijayanti (Ekologi dan Gender)
Francisca Saveria Sika Ery Seda, Ph.D. (Sosiologi, Gender & Kemiskinan, Universitas Indonesia)
Ruth Indiah Rahayu, M. Fil. (Sejarah, Gender & Filsafat, Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara)
Prof. Maria Lichtmann (Teologi Kristen and Feminisme, Appalachian State University, USA)
Assoc. Prof. Muhamad Ali (Agama & Gender, University California, Riverside)
Assoc. Prof. Mun'im Sirry (Teologi Islam & Gender, University of Notre Dame)
Assoc. Prof. Paul Bijl (Sejarah, Budaya & Gender, Universiteit van Amsterdam)
Assoc. Prof. Patrick Ziegenhain (Politik & Gender, Goethe University Frankfurt)
Assoc. Prof. Alexander Horstmann (Studi Asia & Gender, University of Copenhagen)

REDAKSI PELAKSANA

Andi Misbahul Pratiwi

SEKRETARIS REDAKSI

Abby Gina Boangmanalu

REDAKSI

Dewi Komalasari

SEKRETARIAT DAN SAHABAT JURNAL PEREMPUAN

Himah Sholihah
Andri Wibowo

DESAIN & TATA LETAK

Dina Yulianti

ALAMAT REDAKSI:

Jl. Karang Pola Dalam II No. 9A, Jati Padang
Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12540
Telp./Fax (021) 2270 1689
E-mail: yjp@jurnalperempuan.com
redaksi@jurnalperempuan.com

WEBSITE:

www.jurnalperempuan.org
indonesianfeministjournal.org

Cetakan Pertama, Agustus 2020

MAMPU

Kemitraan Australia - Indonesia
untuk Kesetaraan Gender
dan Pemberdayaan Perempuan



MIGRANT CARE
Perempuan Indonesia untuk Buruh Migran Berdaulat

Daftar Isi

Catatan Jurnal Perempuan

Perempuan Pekerja Migran/Women Migrant Workers	iii-iv
Atnike Nova Sigiro	

Artikel

- Dimensi Kerentanan Perempuan Pekerja Migran di Tengah Disrupsi Perkembangan Industri dan Pandemi/*Dimensions of Women Migrant Workers' Vulnerabilities Amidst Industrial Development and Pandemic's Disruption* 135-148
Yovi Arista, Zulyani Evi, Wahyu Susilo
- Perlindungan Perempuan Pekerja Migran: Pembaharuan Hukum yang Tertunda/*Protection for Women Migrant Workers: The Delaying Legal Reform* 149-161
Sulistiyowati Irianto
- Analisis Gender Program Ekonomi Produktif untuk Perempuan Purna Pekerja Migran: Studi Kasus di Desa Kenanga, Kabupaten Indramayu/*Gender Analysis on Productive Economy Program for Returnee Women Migrant Workers: Case Study in Kenanga Village, Indramayu Regency* 163-176
Andi Misbahul Pratiwi, Yusmiati Vistamika Wangka, Andi Nur Faizah
- Kerentanan Pekerja Migran Terhadap Ekstremisme Kekerasan: Studi Kasus Perempuan Purna Pekerja Migran Indonesia di Hong Kong/*Migrant Workers' Vulnerabilities to Exposure of Violent Extremism: Case Study of Indonesian Returnee Women Migrant Workers in Hong Kong* 177-189
Aris Arif Mundayat, Wahyu Susilo, Zulyani Evi
- Perdagangan Perempuan dan Anak di Nusa Tenggara Timur sebagai Kekalahan Komunitas Subsisten terhadap Ekonomi Pasar Tenaga Kerja Migran/*Trafficking of Women and Children in East Nusa Tenggara Province as the Defeat of Subsistent Community to Market Economy of Migrant Labour* 191-207
Dominggus Elcid Li
- Persaudarian Purna Migran: Studi Kasus Program 'Desbumi' dan 'Desmigratif' di Kabupaten Wonosobo/*Ex-Migrant Workers' Sisterhood: Case Study on 'Desbumi' and 'Desmigratif' Programs in Wonosobo District* 209-219
Zulyani Evi, Yovi Arista, Safina Maulida, Arief Rahadian

JP 106 Perempuan Pekerja Migran diterbitkan oleh Yayasan Jurnal Perempuan bersama Migrant CARE dengan dukungan dari Kemitraan Australia-Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (MAMPU). Program MAMPU merupakan inisiatif bersama Pemerintah Australia dan Indonesia bertujuan untuk meningkatkan akses perempuan miskin di Indonesia ke layanan penting dan program pemerintah lainnya dalam rangka mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Pandangan dalam artikel ini merupakan perspektif masing-masing penulis dan tidak mewakili pandangan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia.

Perempuan Pekerja Migran *Women Migrant Workers*

Berdasarkan data *World Migration Report 2020*, Indonesia merupakan satu dari 10 besar negara di Asia penerima remitansi dari pekerja migrannya. Remitansi yang diperoleh dari Pekerja Migran Indonesia (PMI) pada tahun 2017 mencapai US \$ 8,78 miliar, dan pada tahun 2018 meningkat menjadi US \$ 10,97 miliar – atau setara dengan 6,91 persen pendapatan APBN 2019. Meningkatnya remitansi ini berbanding lurus dengan pertumbuhan jumlah PMI sejak tahun 2013 hingga tahun 2019, di mana proporsi pertumbuhan pekerja migran perempuan Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan pekerja migran laki-laki. Pada tahun 2019, BP2MI mencatat jumlah penempatan PMI sebanyak 276.553 orang, dan dari jumlah tersebut 191.237 orang adalah perempuan. Maka dapat diperkirakan bahwa pekerja migran perempuan merupakan penyumbang remitansi terbesar.

Salah satu konsep yang muncul dalam studi feminisme terkait migrasi dan pekerja migran adalah konsep ‘feminisasi migrasi’ (*feminization of migration*). Feminisasi migrasi dapat dilihat sebagai gejala meningkatnya jumlah migrasi perempuan, khususnya arus migrasi di beberapa kawasan, misalnya arus perempuan pekerja migran dari negara-negara berkembang di Asia seperti dari Indonesia, Bangladesh, Filipina ke negara-negara seperti Korea, Taiwan, dan negara-negara di Timur Tengah. Feminisasi migrasi juga dapat dilihat dari meningkatnya permintaan akan jenis pekerjaan ‘feminin’ – atau jenis pekerjaan yang dianggap sebagai pekerjaan perempuan, seperti pekerja rumah tangga, pengasuh, termasuk juga pekerja seks.

Konsep feminisasi migrasi penting untuk mengungkapkan pola migrasi yang tergenderisasi. Konsep feminisasi migrasi mengungkapkan peran perempuan pekerja migran sebagai aktor penting dalam arus migrasi tenaga kerja, dan sebagai penyumbang penting bagi pengentasan kemiskinan melalui remitansi yang dikirim kepada keluarga di kampung halamannya. Konsep yang sama juga dapat mengungkapkan bahwa arus migrasi perempuan telah melanggengkan subordinasi terhadap kerja-kerja domestik, seperti kerja pengasuhan (*care work*) sebagai jenis pekerjaan khas perempuan, pekerjaan rendah, karena dianggap tidak membutuhkan keterampilan. Akibatnya, perempuan pekerja migran pun rentan terhadap eksploitasi dan kekerasan yang terjadi di ranah domestik di negara-

negara penerima, dan juga subordinat dalam kebijakan-kebijakan negara.

Eksplorasi dan kekerasan oleh majikan, maupun penipuan oleh agen pemberi kerja, masih merupakan persoalan-persoalan klasik yang dihadapi oleh perempuan pekerja migran. Di negara tujuan pekerja migran yang tidak memiliki aturan yang baik dalam hal ketenagakerjaan, hak-hak perempuan, kekerasan dalam rumah tangga, serta tidak memiliki penegakan hukum terhadap agen tenaga kerja yang melakukan eksploitasi, maka perempuan pekerja migran akan rentan terhadap kekerasan dan eksploitasi. Kasus-kasus seperti paspor ditahan oleh majikan, visa kerja bermasalah, pekerjaan yang tidak sesuai perjanjian, merupakan beberapa persoalan yang kerap menyebabkan pekerja migran dianggap sebagai pekerja ilegal (*illegal migrant worker*). Status semacam ini membuat pekerja migran kerap kehilangan haknya sebagai subjek hukum.

Kejahatan lintas negara (*trans-national crime*) dan kejahatan internasional terorganisir (*international organized-crime*) juga mengancam perempuan pekerja migran. Beberapa kasus perdagangan manusia, dan kurir narkoba sesungguhnya memperlihatkan kerentanan perempuan pekerja migran terhadap kejahatan lintas negara. Tak hanya itu, fenomena mengejutkan muncul dalam temuan Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC) akan adanya paparan ideologi ekstremisme kekerasan atas nama agama terhadap komunitas perempuan pekerja migran Indonesia di luar negeri. Fenomena keterlibatan perempuan pekerja migran dalam berbagai kejahatan internasional ini akan semakin menyudutkan posisi perempuan pekerja migran yang telah tersubordinasi, menjadi rentan terhadap stigma negatif. Oleh sebab itu, upaya mitigasi ancaman kejahatan internasional terhadap perempuan pekerja migran perlu didorong dalam kerangka pencegahan dan perlindungan, bukan semata-mata dalam kerangka pembedaan dan stigma terhadap perempuan pekerja migran.

Pelindungan pekerja migran merupakan tanggung jawab negara, baik negara pengirim maupun negara penerima. Maka diskursus pekerja migran juga menjadi isu penting dalam hubungan dan kerjasama internasional. Salah satu konsep yang berkembang di tingkat global adalah konsep migrasi aman (*safe migration*). Migrasi aman adalah prosedur migrasi yang aman bagi pekerja

migran untuk mereduksi kerentanan, serta memperkuat akses perlindungan dan hak pekerja migran. Konsep ini telah disepakati oleh komunitas internasional dan dituangkan dalam Konvensi PBB No. 1990 tentang Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (*International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families*). Sebagai salah satu negara pihak dari Konvensi 1990 ini, Indonesia berkewajiban untuk menerjemahkan upaya perlindungan pekerja migran melalui pembentukan aturan perundang-undangan, kebijakan, serta tata kelola migrasi tenaga kerja yang aman dan bermartabat, baik di tingkat nasional, daerah, maupun dalam perjanjian bilateral maupun multilateral terkait migrasi tenaga kerja.

Kemajuan dalam upaya perlindungan PMI tampak dengan disahkannya Undang-undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI). UU PPMI tahun 2017 dinilai telah membawa kerangka normatif yang positif terhadap perlindungan pekerja migran, khususnya jika dibandingkan dengan UU terdahulu yang sangat berorientasi bisnis. Namun UU PPMI tahun 2017 dinilai masih belum memasukkan dimensi gender yang dibutuhkan agar perlindungan PMI juga responsif terhadap persoalan perempuan pekerja migran.

Untuk mengatasi persoalan kemiskinan, banyak perempuan pekerja migran harus terus hidup dalam siklus migrasi hingga fisik atau kondisi sosial (misalnya

menikah, memiliki anak, orang tua sakit) mengharuskan mereka berhenti menjadi pekerja migran. Ketika menjadi seorang purna pekerja migran, mereka tetap akan menghadapi persoalan kemiskinan struktural di pedesaan. Perhatian terhadap situasi perempuan purna migran semestinya juga mendapatkan perhatian lebih, baik oleh masyarakat maupun pemerintah. Program 'Desa Peduli Buruh Migran' (Desbumi) yang dikembangkan oleh Migrant CARE dan 'Desa Migran Produktif' (Desmigratif) yang dikembangkan pemerintah, merupakan inisiatif program yang penting bagi perempuan purna pekerja migran, dengan mengintegrasikan upaya pemberdayaan perempuan purna migran dengan masyarakat desa atau kampung halaman mereka. Salah satu akar dari arus pekerja migran adalah kemiskinan di pedesaan, maka masa depan perempuan purna pekerja migran tidak dapat dilepaskan dari upaya untuk mengentaskan kemiskinan di pedesaan.

Jurnal Perempuan edisi Perempuan Pekerja Migran mengangkat beberapa kajian terkait diskursus dan situasi perempuan pekerja migran di Indonesia. Tanpa lensa gender maka akan sulit untuk merumuskan perlindungan perempuan pekerja migran melalui kebijakan maupun program-program perlindungan dan layanan yang dibutuhkan oleh perempuan pekerja migran. Pemahaman kritis mengenai feminisasi migrasi juga penting untuk membangun kesadaran publik tentang keberadaan dan kerentanan yang dihadapi oleh para pahlawan devisa ini. Selamat membaca!
(Atnike Nova Sigiro)

Yovi Arista, Zulyani Evi, Wahyu Susilo
(Migrant CARE, Jakarta Selatan)

Dimensi Kerentanan Perempuan Pekerja Migran di Tengah Disrupsi Perkembangan Industri dan Pandemi

Dimensions of Women Migrant Workers' Vulnerabilities Amidst Industrial Development and Pandemic's Disruption

Kode Naskah: DDC 305
Jurnal Perempuan, Vol. 25 No. 3, Agustus 2020, hal. 135-148, 3 gambar, 3 tabel, 32 daftar pustaka

Women migrant workers have a significant role and contribution in driving migration, economy, and global development. Behind the remittance flows, women migrant workers are still overshadowed by the threats of various problems. The dimensions of the problems faced are increasingly complex as the depletion of mobility limits between countries, the increasing of securitization policy as well as the rapid progress of global development in social, economic, and political aspects. Through the literature review, this article intends to highlight the vulnerability of Indonesian women migrant workers from the perspective of migration and governance from a feminist perspective. The results of the review show that women migrant workers are still facing multidimensional vulnerability. This includes the actual conditions of women migrant workers facing injustice, violations of rights, affected by disruption of information-technology, and being center in the pandemic crisis. This condition also leads to the structural aspects related to protection's policy and institutional issues that are not sensitive to the interests and the root of problems faced by women migrant workers.

Keywords: women, migration, migrant workers, women migrant worker.

Perempuan pekerja migran memiliki peranan dan kontribusi yang signifikan dalam menggerakkan perekonomian dan pembangunan global. Di balik aliran remitansi yang dikontribusikan, perempuan pekerja migran masih terus dibayangi ancaman atas beragam permasalahan. Dimensi permasalahan yang dihadapi semakin kompleks seiring menipisnya batasan mobilitas antar negara namun juga menguatnya sekuritisasi perbatasan, serta perkembangan pesat geliat sosial, ekonomi dan politik global. Melalui tinjauan kepustakaan, artikel ini bermaksud untuk menyoroti kerentanan perempuan pekerja migran dari Indonesia dalam kacamata kebijakan dan tata kelola migrasi dengan perspektif feminis. Hasil tinjauan menunjukkan bahwa perempuan pekerja migran masih menghadapi kerentanan multi-dimensi. Di dalamnya termasuk kondisi-kondisi aktual perempuan pekerja migran menghadapi ketidakadilan, pelanggaran hak, terdampak disrupsi teknologi informasi, hingga berada dalam pusaran kecamuk krisis pandemi. Kondisi ini juga bermuara pada aspek struktural terkait persoalan kebijakan dan kelembagaan perlindungan yang tidak sensitif pada kepentingan dan akar permasalahan yang dihadapi perempuan pekerja migran.

Kata kunci: perempuan, migrasi, pekerja migran, perempuan pekerja migran.

Sulistiyowati Irianto
(Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok)

Perlindungan Perempuan Pekerja Migran: Pembaharuan Hukum yang Tertunda

Protection for Women Migrant Workers: The Delaying Legal Reform

Kode Naskah: DDC 305
Jurnal Perempuan, Vol. 25 No. 3, Agustus 2020, hal. 149-161, 14 daftar pustaka

Seen as a breakthrough in protecting migrant workers, of whom are predominantly female, Law No. 18/2017 on the Protection of Indonesian Migrant Workers (The Migrant Workers Act of 2017), replacing Law No. 39/2004, is not void of imperfections. Prima facie, the act may be seen as progressive development in protecting Indonesian migrant workers, having embraced the many experiences and realities their profession entails. However, upon investigating the Act under the careful lens of Feminist Jurisprudence as well as other national legal instruments for gender equality, the Migrant Workers Act of 2017 still provides unsatisfactory details in regards to the protection of female workers; if the government does not quickly act by making corresponding regulations, the Act will in fact, introduce us to new problems from what was seen as a one-size fits all solution. In its implementation, legal literacy becomes one of the most profound challenges the 2017 Act faces. Field research findings in three areas (Sukabumi, Lampung, and Jakarta) show that legal literacy on this Act remains sparse. This article will address problems in regards to the 2017 Act, its implementation, and solutions to develop more tangible legal instruments in protecting Indonesian migrant workers, in particular, women, who, in foreign lands, often face the risk of violence and abuse on a daily basis with little to no protection.

Keywords: Feminist jurisprudence, migrants workers, gender justice, law literacy.

Suatu terobosan dalam bidang perlindungan pekerja migran, sebagian besarnya perempuan, dapat ditemukan dalam UU No.18/2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. UU ini lahir 13 tahun kemudian menggantikan UU No. 39/2004, yang menurut banyak kajian dan dalam praktiknya menyebabkan banyak persoalan. UU baru ini tampak bersifat progresif, telah banyak mengakomodir pengalaman dan realitas pekerja migran. Namun ketika diperiksa dengan pendekatan Yurisprudensi Feminis, dan menyandingkannya dengan berbagai pasal dari berbagai instrumen hukum lain yang berperspektif keadilan gender, maka tampak adanya ruang-ruang kosong yang tidak spesifik menyebut perlindungan bagi perempuan. Ruang kosong itu bila tidak segera diisi dengan peraturan pelaksanaan di bawahnya, akan kurang maksimal dalam memberi perlindungan bagi pekerja migran perempuan. Temuan penelitian lapangan di tiga wilayah (Sukabumi, Lampung dan Jakarta) menunjukkan bahwa literasi hukum yang meliputi pengetahuan tentang UU baru ini belum terbangun. Di sinilah letaknya tantangan baru bagi implementasi UU ini ke depan.

Kata kunci: Yurisprudensi Feminis, pekerja migran, keadilan gender, literasi hukum

¹Andi Misbahul Pratiwi, ²Yusmiati Vistamika Wangka,
²Andi Nur Faizah
(¹Jurnal Perempuan & ²Program Studi Kajian Gender
Universitas Indonesia, Jakarta)

Analisis Gender Program Ekonomi Produktif untuk Perempuan Purna Pekerja Migran: Studi Kasus di Desa Kenanga, Kabupaten Indramayu

Gender Analysis on Productive Economy Program for Returnee Women Migrant Workers: A Case Study in Kenanga Village, Indramayu District

Kode Naskah: DDC 305
Jurnal Perempuan, Vol. 25 No. 3, Agustus 2020, hal. 163-176, 1 tabel, 23 daftar pustaka

Indonesia is one of the countries of origin for migrant workers in the world. In the context of migration, the discourse on natural resources, sustainable economy, and women's empowerment are not the mainstream discussion. The resilience or economic sustainability of returnee women migrant workers (RWMWs) is also a major problem in migration policy schemes and practices in Indonesia. This paper explores how the model of economic empowerment in Kenanga Village, Indramayu District, as a local initiative can bring welfare toward RWMWs and goes beyond the discourse of safe migration. The data in this research analyzed using Harvard and Longwee' gender analysis tools as well as indicator of gender mainstreaming, and Naila Kabeer's theory of empowerment. This paper finds that local initiatives of productive economy have a positive impact on the economic sustainability of RWMWs in Kenanga Village. It is important to develop economic resilience as an alternative to alleviate poverty. However, in the empowerment program, it is important to consider various aspects of gender justice.

Keywords: returnee women migrant workers (RWMWs), women's economic empowerment, Kabupaten Indramayu, gender analysis.

Indonesia merupakan salah satu negara asal pekerja migran di dunia. Dalam konteks migrasi, diskursus mengenai sumber daya alam, ekonomi berkelanjutan, dan pemberdayaan perempuan tidak menjadi perbincangan arus utama. Ketahanan atau keberlanjutan ekonomi purna pekerja migran juga masih menjadi masalah utama dalam skema kebijakan dan praktik migrasi di Indonesia. Tulisan ini menggali bagaimana model pemberdayaan ekonomi di Desa Kenanga, Kabupaten Indramayu, sebagai sebuah insiatif lokal dapat menghadirkan kesejahteraan bagi perempuan purna pekerja migran dan melampaui diskursus migrasi aman. Data dalam penelitian ini dianalisa dengan alat analisa gender yakni Harvard, Longwee, dan indikator pengarusutamaan gender, dan teori pemberdayaan dari Naila Kabeer. Tulisan ini menemukan bahwa inisiatif lokal ekonomi produktif membawa dampak positif terhadap keberlanjutan ekonomi purna pekerja migran di Desa Kenanga. Ketahanan ekonomi di daerah asal menjadi penting untuk dibangun sebagai salah satu jalan keluar untuk mengentaskan kemiskinan. Namun demikian, dalam setiap program pemberdayaan penting untuk memperhatikan aspek keadilan gender.

Kata Kunci: perempuan purna pekerja migran, pemberdayaan ekonomi perempuan, Kabupaten Indramayu, analisa gender.

Aris Arif Mundayat, Wahyu Susilo, Zulyani Evi
(Migrant CARE, Jakarta Selatan)

Kerentanan Pekerja Migran Terhadap Ekstremisme Kekerasan: Studi Kasus Perempuan Purna Pekerja Migran Indonesia di Hong Kong

Migrant Workers' Vulnerabilities to Exposure of Violent Extremism: Case Study of Indonesian Returnee Women Migrant Workers in Hong Kong

Kode Naskah: DDC 305
Jurnal Perempuan, Vol. 25 No. 3, Agustus 2020, hal. 177-189, 1 tabel, 23 daftar pustaka

This qualitative study analyzes the involvement of female perpetrators of extreme violence acts and suicide bombings against the modern state as a symbol of their religious enemies. The topic is crucial as it shows the meaningful reasons for female militancy, where women are seen to exceed their gender norms. It is not because they take their own lives but also to bring their children to embrace death in the process of religious-based violent extremism. This article opposes the idea of gender in binary opposition as female and male, but rather see it as a range of gender spectrum. The understanding of the main symbolic structures here is crucial as it is capable of dismantling aspects that temporarily limit gender roles. At the same time, what they are doing is constructing new ideas that "God do not see you in someone appearance" included their gender, but rather their "action". It is their way to find justification to support extreme violence, although it is against religious teaching.

Keywords: gender, violent extremism, faith, ideology.

Studi kualitatif ini menganalisis keterlibatan perempuan pelaku aksi kekerasan ekstrem dan bom bunuh diri terhadap negara modern sebagai simbol dari musuh agama mereka. Topik ini krusial karena menunjukkan makna dibalik militansi perempuan, dimana perempuan terlihat melampaui norma gender mereka. Bukan karena mereka mengakhiri nyawa mereka sendiri, tapi karena mereka juga membawa serta anak-anak mereka untuk menyambut kematian dalam proses kekerasan ekstrem berbasis agama. Artikel ini menentang gagasan gender dalam oposisi biner sebagai perempuan dan laki-laki, tetapi lebih melihatnya sebagai rentang spektrum gender. Pemahaman tentang struktur utama simbolik di sini sangat penting karena mampu membongkar aspek-aspek yang untuk sementara waktu membatasi peran gender dalam pengertian oposisi biner. Pada saat yang sama, yang mereka lakukan adalah membangun ide-ide baru bahwa "Tuhan tidak melihat Anda dalam penampilan seseorang" termasuk gendernya, melainkan "tindakannya". Ini adalah cara mereka menemukan pembenaran untuk mendukung kekerasan ekstrem, meskipun bertentangan dengan ajaran agama.

Kata Kunci: gender, ekstremisme kekerasan, kepercayaan, ideologi.

Dominggus Elcid Li
(Institute of Resource Governance and Social Change,
Nusa Tenggara Timur)

Perdagangan Perempuan dan Anak di Nusa Tenggara Timur sebagai Kekalahan Komunitas Subsisten terhadap Ekonomi Pasar Tenaga Kerja Migran

Trafficking of Women and Children in East Nusa Tenggara Province as the Defeat of Subsistent Community to Market Economy of Migrant Labour

Kode Naskah: DDC 305
Jurnal Perempuan, Vol. 25 No. 3, Agustus 2020, hal. 191-207, 2 grafik, 4 gambar, 6 tabel, 20 daftar pustaka

The analytical view explores in this paper represent the perspective of subsistent farmers in NTT Province when integrated with market economy. It tries to explain why the subsistent community are so vulnerable to become migrant workers and uprooted from their land; it is also attempt to investigate the relation between economic policy on free labour market with death and torture received by migrant workers. While the victims, especially women and children, are publicized and attracted attention from mass media and also social media. However, the publication over the suffering of migrant workers from the margin of Indonesia such as NTT Province, does not get direct impact over the policy makers with the willingness to renew regulation to protect migrant workers. This paper focuses on investigating why the poor migrant women and children are being neglected by policy makers under the neoliberal order. It also tries to explain why the subsistent members are easily uprooted from their land and become migrant workers during modernization. It also tries to answer why the are often in position as the losers or victims during globalization. The hope that the State is able to protect the vulnerables is fading away under the domination of pro market policy. Children and women as the silent victims are the evidence of absolute surrender of the subsistent community. State incapacity to protect the most vulnerable citizens is the evidence of the coming of new wave of neocolonialism. This is also a proof the modernization is also part of conquering when half-hearted modernization has placed them at the bottom of the pyramid of modernity which is vulnerable to be exploited without the ability to speak and to be listened.

Keywords: human trafficking, trafficking of women, trafficking of girl, migrant labour, east nusa tenggara.

Kajian perdagangan orang dalam tulisan ini dibahas dalam perspektif kekalahan para petani subsisten di Nusa Tenggara Timur ketika terintegrasi dalam ekonomi pasar. Tulisan berusaha menjelaskan mengapa kaum subsisten dengan mudah beralih menjadi buruh

migran dan tercerabut dari tanahnya seiring gelombang modernisasi, dan juga berupaya menggali hubungan antara pasar bebas tenaga kerja dengan kematian dan siksaan yang mereka terima. Meskipun penderitaan anak dan perempuan buruh migran miskin dari NTT mendapat publikasi luas, penderitaan mereka cenderung diabaikan oleh para pembuat kebijakan di era neoliberal. Harapan bahwa negara akan mampu melindungi warga negara yang lemah semakin menjauh karena dominasi pikiran pro pasar tanpa regulasi dan proteksi pada tenaga kerja. Anak-anak perempuan yang menjadi korban perdagangan orang merupakan bukti kekalahan mutlak komunitas-komunitas subsisten. Ketiadaan perlindungan terhadap warga negara yang paling rentan merupakan kekalahan negara terhadap gelombang pasang neokolonialisme. Ini juga menjadi bukti bahwa modernisasi yang dijalankan dengan setengah hati menjadi bagian dari penaklukan terhadap komunitas subsisten dan meletakkan mereka di dasar piramida modernitas yang rentan dieksploitasi tanpa mampu bersuara dan didengarkan.

Kata Kunci: perdagangan manusia, perdagangan perempuan, perdagangan anak perempuan, buruh migran, nusa tenggara timur.

Zulyani Evi, Yovi Arista, Safina Maulida, Arief Rahadian
(Migrant CARE, Jakarta Selatan)

Persaudarian Purna Migran: Studi Kasus Program 'Desbumi' dan 'Desmigratif' di Kabupaten Wonosobo

*Ex-Migrant Workers' Sisterhood: Case Study on 'Desbumi' and
'Desmigratif' Programs in Wonosobo District*

Kode Naskah: DDC 305

Jurnal Perempuan, Vol. 25 No. 3, Agustus 2020, hal. 209-219, 10 daftar pustaka

Ex-migrant workers are often found dealing with the lack of union that could cater their needs. These people that are mostly female are often excluded from the process of decision making in their own villages. In 2013, a program from civil society organization called Desbumi (*Desa Peduli Buruh Migran* or *Migrant Workers Care Village*) Initiative was launched in Wonosobo District, with the aim to improve migrant workers' living conditions - especially female - through empowering female ex-migrant workers group. In 2016, a similar program called Desmigratif (*Desa Migran Produktif* or *Productive Migrants Village*) Initiative was spearheaded by the Ministry of Manpower, which shares

the same goal with Desbumi Initiative. Building upon the debates surrounding the concept of sisterhood provided by Bell Hooks and Robin Morgan, this study discusses whether the top-down approach in organizing female ex-migrant workers residing in Kuripan, Lipursari, Rogojati, and Sindupaten Village through Desbumi and Desmigratif initiative could result in any forms of sisterhood formed during the implementation of the programs, and challenges that they faced along the way. This study found that characteristics associated with sisterhood of friendships were apparent in all female ex-migrant groups, signified by mutual support among women, shared experience, journey of self-discovery, and collective identity built upon similarities. On the discussion of challenges, several obstacles such as lack of regeneration, women's domestic burden, and the issue of sustainability appeared along the journey of the sisterhood of ex-migrant workers.

Keywords: Ex-migrant workers, migrant workers, migrant village, rural women, sisterhood.

Purna Migran kerap mengalami kesulitan dalam mencari kelompok yang mampu memfasilitasi kebutuhan mereka. Purna migran - yang umumnya adalah perempuan - seringkali tereksklusi dari proses pengambilan keputusan di desanya masing-masing. Pada tahun 2013, program Desbumi (*Desa Peduli Buruh Migran*) diinisiasi di Kabupaten Wonosobo oleh organisasi masyarakat sipil, dengan tujuan memperbaiki kondisi pekerja migran melalui pemberdayaan komunitas perempuan purna migran. Pada tahun 2016, Kementerian Ketenagakerjaan menginisiasi program Desmigratif (*Desa Migran Produktif*) dengan tujuan program yang relatif sama dengan Desbumi. Berangkat dari pembahasan terkait konsep persaudarian yang disajikan oleh Bell Hooks dan Robin Morgan, studi ini membahas tentang bagaimana pendekatan *top-down* dalam pengorganisasian kelompok perempuan purna migran di Desa Kuripan, Lipursari, Rogojati, dan Sindupaten melalui program Desbumi dan Desmigratif mampu melahirkan bentuk-bentuk persaudarian, serta tantangan yang dihadapi oleh persaudarian sepanjang perjalanan mereka. Studi ini menemukan bahwa karakteristik yang identik dengan *sisterhood of friendships* seperti dukungan antar-perempuan, pengalaman bersama, perjalanan mencari jati diri, dan kelahiran identitas kolektif muncul di dalam kelompok-kelompok purna migran perempuan di keempat desa. Terkait tantangan yang dihadapi persaudarian, kesulitan regenerasi, beban domestik perempuan, serta isu keberlanjutan menjadi tantangan yang harus dihadapi persaudarian purna migran.

Kata Kunci: Purna migran, pekerja migran, desa migran, perempuan pedesaan, persaudarian.

Kerentanan Pekerja Migran Terhadap Ekstremisme Kekerasan: Studi Kasus Perempuan Purna Pekerja Migran Indonesia di Hong Kong

Migrant Workers' Vulnerabilities to Exposure of Violent Extremism: Case Study of Indonesian Returnee Women Migrant Workers in Hong Kong

¹Aris Arif Mundayat, ²Wahyu Susilo, ³Zulyani Evi

Migrant CARE

Perkumpulan Indonesia untuk Buruh Migran Berdaulat
Jl. Jatipadang I No. 5A, Jatipadang-Pasar Minggu Jakarta Selatan, Indonesia 12540

¹risrif@gmail.com, ²wahyu@migrantcare.net, ³evi@migrantcare.net

Kronologi Naskah: diterima 8 Agustus 2020, direvisi 15 Agustus 2020, diputuskan diterima 23 Agustus 2020

Abstract

This qualitative study analyzes the involvement of female perpetrators of extreme violence acts and suicide bombings against the modern state as a symbol of their religious enemies. The topic is crucial as it shows the meaningful reasons for female militancy, where women are seen to exceed their gender norms. It is not because they take their own lives but also to bring their children to embrace death in the process of religious-based violent extremism. This article opposes the idea of gender in binary opposition as female and male, but rather see it as a range of gender spectrum. The understanding of the main symbolic structures here is crucial as it is capable of dismantling aspects that temporarily limit gender roles. At the same time, what they are doing is constructing new ideas that "God do not see you in someone appearance" included their gender, but rather their "action". It is their way to find justification to support extreme violence, although it is against religious teaching.

Keywords: gender, violent extremism, faith, ideology.

Abstrak

Studi kualitatif ini menganalisis keterlibatan perempuan pelaku aksi kekerasan ekstrem dan bom bunuh diri terhadap negara modern sebagai simbol dari musuh agama mereka. Topik ini krusial karena menunjukkan makna dibalik militansi perempuan, dimana perempuan terlihat melampaui norma gender mereka. Bukan karena mereka mengakhiri nyawa mereka sendiri, tapi karena mereka juga membawa serta anak-anak mereka untuk menyambut kematian dalam proses kekerasan ekstrem berbasis agama. Artikel ini menentang gagasan gender dalam oposisi biner sebagai perempuan dan laki-laki, tetapi lebih melihatnya sebagai rentang spektrum gender. Pemahaman tentang struktur utama simbolik di sini sangat penting karena mampu membongkar aspek-aspek yang untuk sementara waktu membatasi peran gender dalam pengertian oposisi biner. Pada saat yang sama, yang mereka lakukan adalah membangun ide-ide baru bahwa "Tuhan tidak melihat Anda dalam penampilan seseorang" termasuk gendernya, melainkan "tindakannya". Ini adalah cara mereka menemukan pembenaran untuk mendukung kekerasan ekstrem, meskipun bertentangan dengan ajaran agama.

Kata Kunci: gender, ekstremisme kekerasan, kepercayaan, ideologi.

Pendahuluan

Laporan hasil penelitian yang diluncurkan Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC) mengungkap bagaimana perempuan pekerja migran Indonesia di Hong Kong terpapar ideologi ekstremisme kekerasan atas nama agama, beberapa di antaranya bahkan bersedia menjadi "pengantin" dalam rencana aksi terorisme (IPAC 2017). Laporan ini memang tidak menggeneralisasi seluruh perempuan pekerja migran, namun hanya menunjukkan bahwa ada potensi ISIS merekrut perempuan pekerja migran. Namun studi ini menimbulkan kecemasan

di kalangan perempuan pekerja migran ketika dipublikasikan ke media. Karena temuan ini berpotensi memberi stigma terhadap perempuan pekerja migran.

Topik yang diteliti IPAC krusial, karena tidak hanya bersumber dari institusi yang bekerja memberantas terorisme, tapi juga dari institusi yang mengatur migrasi tenaga kerja dan kelompok masyarakat sipil. Berdasarkan hal tersebut, artikel ini mengangkat pertanyaan mengenai bagaimana ide ekstremisme kekerasan berkembang di antara perempuan pekerja migran Indonesia yang bekerja di Asia Timur, bukan di Asia Tenggara atau

Timur Tengah yang selama ini teridentifikasi sebagai wilayah asal perkembangan ekstremisme kekerasan. Artikel berbasis riset ini berusaha memberi gambaran utuh tentang kerentanan dan keterpaparan pekerja migran Indonesia di Hong Kong terhadap pandangan radikalisme/ ekstremisme dari sudut pandang gerakan advokasi pekerja migran Indonesia. Dengan demikian, rekomendasi-rekomendasi operasional untuk memitigasi terpaparnya pekerja migran Indonesia dari radikalisme/ekstremisme tetap berorientasi pada upaya perlindungan.

Tujuan kajian ini adalah menyediakan analisis situasional terhadap keterlibatan perempuan dalam tindakan ekstremisme kekerasan. Dengan latar belakang tersebut, peneliti membahas lebih jauh pola pikir ideologi kepercayaan yang menyebabkan perempuan menjadi lebih mungkin terlibat dalam terorisme terkait dengan keprihatinan mereka untuk melawan musuh agama mereka di dunia modern ini. Kedua, analisis ini mempertimbangkan politik pemaknaan (*politics of meaning*) dan sistem pertentangan (*systems of contention*) yang digunakan kelompok religius untuk melegitimasi pengajuan diri perempuan sebagai martir. Dari analisis tersebut didapati doktrin yang beredar di antara mereka yaitu bahwa "Tuhan tidak memandang penampilanmu, melainkan hati dan tindakanmu" yang menyebabkan tak hanya pria, namun perempuan atau siapa pun untuk melaksanakan kekerasan ekstrem sebagai bagian dari aksi mereka dalam melawan yang mereka anggap musuh agama.

Studi dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan metode penelitian observasi dan analisis situasional terhadap perempuan pekerja migran yang berpengalaman tinggal di Hong Kong dan juga para perempuan mantan pekerja migran yang pernah bekerja di sana. Metodologi tersebut dipilih guna memahami alur perkembangan ideologi keagamaan setelah mereka terlibat dalam aktivisme sosial keagamaan, dalam hal ini agama Islam yang dianut sebagian besar perempuan pekerja migran Indonesia yang bekerja di Hong Kong. Proses ideologisasi religius antar perempuan ini bertujuan untuk memahami bagaimana perempuan dikonstruksikan sebagai agen yang membuat mereka akhirnya bersedia dan berkomitmen untuk bergabung dalam jaringan ekstremisme kekerasan. Studi ini membandingkan dua kelompok perempuan pekerja migran di Hong Kong untuk memahami kondisi mereka yang tidak terlibat dalam jaringan ekstremisme/ terorisme dan kondisi yang menyebabkan mereka bergabung dengan ISIS. Kedua kelompok tersebut memiliki pengalaman yang serupa dalam konteks deprivasi

multi-dimensional, hidup yang rentan (*precarious*), dan kepanikan moral akibat hidup di kota kosmopolitan.

Aspek gender dalam ekstremisme kekerasan merupakan faktor yang kritis, bukan karena tindakannya, namun berkaitan dengan perspektif analitis terhadap perempuan yang terlibat dalam sebuah perjuangan yang melibatkan kekerasan. Meski dianggap mengejutkan secara normatif, namun keterlibatan perempuan dan anak nyatanya terjadi. Analisis gender selama ini cenderung melihat perempuan dalam perspektif oposisi biner dari laki-laki. Cara pandang ini telah menghasilkan cara pandang normatif secara stereotipikal terhadap perempuan dan laki-laki dalam konteks kekerasan. Untuk itu diperlukan cara pandang baru memahami permasalahan gender sebagai rentang spektrum dari perempuan hingga laki-laki. Cara pandang ini penting untuk membuka pikiran dalam memahami bahwa tindakan kekerasan dapat dilakukan oleh gender apa pun, karena konteks yang memungkinkannya untuk terjadi.

Tinjauan Pustaka

Kajian terkait pekerja migran Indonesia memang sudah banyak dilakukan, demikian pula dengan kajian mendalam tentang radikalisme, ekstremisme dan terorisme di Indonesia. Namun kajian tentang kerentanan pekerja migran Indonesia yang terpapar radikalisme/ ekstremisme yang menjadi bagian dari kejahatan terorisme belum banyak dilakukan, baik oleh peneliti asing maupun peneliti Indonesia.

Kajian ini melihat bahwa kaum perempuan yang dengan sukarela melibatkan diri dalam terorisme tampak menemukan ruang baru yang mereka anggap sebagai jalan keluar dari keterpinggiran mereka. Aktivitas yang mereka lakukan dalam banyak hal justru menunjukkan militansi yang lebih tinggi daripada kaum laki-laki. Perspektif gender sebagai rentang spektrum perlu dipahami dalam konteksnya. Tesis dari kajian ini melihat bahwa keterlibatan kaum perempuan muda, khususnya pekerja migran, ke dalam ekstremisme kekerasan dapat dilihat dalam konteks keterpinggiran mereka di konteks sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Keterpinggiran dapat terjadi karena mereka terlempar dari konteks kewarganegaraan suatu negara menjadi warga dari sistem ekonomi pasar. Faktor-faktor tersebut bekerja secara bersamaan membentuk faktor yang bersifat multi-dimensional yang mereka rasakan sebagai warga yang terlempar. Mereka kemudian menemukan agama yang memiliki konsep bahwa segala yang ada di muka bumi ini adalah milik sang Pencipta. Dalam keterlemparan

itu, mereka menemukan “kewarganegaraan imajiner” berbasis agama yang dibayangkan sebagai jauh lebih baik.

Untuk memahami konteks keterpinggiran suatu kelompok agama, Boubaker meneliti tindakan ekstremisme kekerasan yang dilakukan oleh kelompok Salafisme Wahhabi yang menarik kaum muda yang kecewa terhadap Islam yang didominasi kaum tua (Boubaker 2011). Kaum tua ini dianggap membiarkan situasi yang terjadi hingga menyebabkan keterpinggiran umat Islam secara luas. Sementara itu perlawanan berbasis agama di kalangan muda telah menjadi kesempatan inspirasional bagi mereka untuk memperjuangkan sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri, yang melampaui akal sehat untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi dalam hidup mereka (Marks 2013; Alonso & García Rey 2007). Mereka membayangkan dirinya akan menjadi warga surga jika melawan apa pun yang membuat mereka terpinggir di dunia ini.

Perlawanan dengan jalan kekerasan, bukanlah monopoli kaum laki-laki, karena agama dalam hal ini memainkan peran sebagai kekuatan untuk melawan sistem ekonomi dunia yang didominasi oleh kapitalisme dan sistem politik demokrasi. Bahkan posisi kewarganegaraan mereka terlempar dan menjadi warga sistem ekonomi kapitalisme yang mereka tolak. Dalam pandangan mereka, agama merupakan alternatif dari kapitalisme dan demokrasi yang telah meminggirkan mereka. Dalam melawan rejim ketimpangan yang sekuler tersebut, mereka menjawabnya dengan cara kekerasan ekstrem, bukan secara politik. Meskipun ajaran agama di satu sisi mengajak damai dan menghargai kemanusiaan, namun mereka menafsirkan dan memilih ayat-ayat yang lebih militan dan keras untuk menjawab keterpinggiran mereka di dunia mereka sendiri. Ini berarti kekuatan agama berpotensi untuk terbentuknya subjek sebagai agensi, sehingga mereka memiliki kemauan untuk menemukan posisi subjek dalam dunia sosial melalui perjuangan dengan cara apa pun.

Pekerja migran menjadi target pelaku ekstremisme kekerasan karena dua hal, mereka adalah kaum prekariat secara multi-dimensional, sehingga lebih mudah untuk diajak melawan kondisi yang membuatnya rentan. Pekerja migran juga memiliki jaringan internasional yang kuat, terlebih jika mereka pernah bekerja di sejumlah negara. Keterpaparan perempuan pekerja migran terhadap kegiatan kekerasan ekstrem baik secara langsung maupun melalui berbagai media alternatif lebih menunjukkan tentang kekuatan jaringan komunikasi.

Dua faktor tersebut merupakan modal mereka yang memiliki karakter keagensian subjek pekerja migran.

Kajian ini menemukan bahwa perempuan pekerja migran merupakan kelompok gender yang mengalami kondisi prekariat yang lebih parah dibandingkan kaum lelaki. Tekanan hidup tersebut telah membuat mereka menjadi lebih militan dalam menjalankan aksi atas nama agama. Guy Standing (2014) berargumen bahwa di dalam konteks perkembangan ekonomi neoliberal tumbuh kelas sosial yang terbentuk oleh orang-orang yang menderita karena prekariat yang mereka alami. Ini merupakan kondisi dari suatu keadaan tanpa dapat diprediksi apakah aman atau tidak karena kondisi kerentanan hidup memengaruhi kesejahteraan materi atau psikologis.

Kondisi kerentanan tersebut dihadapi oleh seluruh rentang spektrum gender. Oleh karena itu kajian ini melihat gender sebagai spektrum dalam konsep keagamaan Islam, di mana ketika mereka melakukan tindakan keagamaan maka yang dilihat oleh Tuhan bukanlah dari penampilan (termasuk gendernya) melainkan dari niat hati dan tindakannya. Untuk memahami aspek rentang spektrum gender yang menolak cara pandang berdasarkan logika oposisi biner, kajian ini meminjam perspektif Jacques Derrida (1997) tentang teori dekonstruksi yang menolak logika biner dan hierarkis yang selama ini menguasai cara pandang manusia bahkan teori-teori Barat. Derrida mengajukan cara “mendekonstruksi” fenomena oposisi biner dengan mengeksplorasi ketegangan dan kontradiksi antara urutan hierarki yang diasumsikan (kadang secara eksplisit ditegaskan) dalam teks dan aspek lain dari makna teks, terutama yang tidak langsung atau yang bergantung pada penggunaan figuratif atau performatif bahasa.

Diantara sebuah pasangan yang berlawanan (*binary oppositional*) terdapat ketegangan yang membuat makna hubungan tersebut tidak pernah mantab. Meski demikian cara pandang tersebut berpengaruh bagi orang untuk memahami dunianya sehingga melanggengkan normativitas dan performativitas dari fenomena yang berpasangan secara oposisional tersebut. Judith Butler (1999) berargumen bahwa perempuan dibentuk secara normatif dan performatif untuk bertindak secara submisif sehingga hirarkinya lebih rendah dari laki-laki, demikian pula dengan kaum LGBT. Oleh karena itu cara pandang yang melihat hubungan perempuan dan laki-laki adalah pasangan berlawanan sesungguhnya justru melanggengkan perendahan terhadap perempuan oleh karena itu harus dibongkar. Misalnya istilah *female vs male*

dalam bahasa Inggris, atau *woman vs man* mengandung perendahan terhadap posisi subjek perempuan secara sosial sebagai kelas kedua secara hirarkis setelah laki-laki.

Buttler (2004) yang juga terpengaruh cara pandang dekonstruksi dari Derrida mengajukan gagasan yang senada yaitu apa yang ia sebut sebagai *undoing gender* sebagai strategi untuk melawan pembentukan identitas gender. Dalam praktiknya, hal ini cukup sulit untuk dilakukan. Oleh karena itu kajian ini mencoba untuk lebih realistis bahwa dalam memahami gender logika oposisi biner perlu untuk ditinggalkan, dengan memandang bahwa persoalan gender perlu dilihat sebagai rentang spektrum dari perempuan hingga laki-laki, sehingga menempatkan LGBT di antara rentang spektrum tersebut.

Melalui strategi yang melihat gender sebagai rentang spektrum yang tidak hirarkis dan bukan pasangan yang beroposisi maka rentang spektrum gender dapat dilihat secara setara. Ini adalah cara yang radikal untuk melawan regim ketimpangan gender secara lebih realistis. Artinya ketika gender dilihat sebagai rentang spektrum maka setiap individu sesungguhnya adalah agensi yang terkait dengan konteksnya yang dapat melakukan perubahan karena mereka selalu melakukan perjuangan dalam dunia sosialnya untuk menghadapi berbagai tekanan yang mereka alami. Kajian ini akan membuktikan bagaimana perempuan terlibat dalam tindak ekstremisme kekerasan karena adanya hubungan antara konteks pengalaman perempuan dengan gender sebagai rentang spektrum yang tidak hirarkis.

Kondisi perempuan pekerja migran di Hong Kong yang dalam kajian ini menghadapi berbagai tekanan dan ketidakpastian hidup serta deprivasi yang multidimensional telah membongkar cara pandang mereka bahwa apa yang mereka alami sebagai perempuan adalah penindasan yang berlapis-lapis. Pengalaman tersebut membawa pada hasrat untuk melawan apa yang mereka alami. Agama kemudian menyediakan jawaban yang juga berfungsi untuk membongkar logika oposisi biner dari perempuan vs laki-laki yang sesungguhnya tidak penting bagi Tuhan. Sebagaimana yang mereka yakini, bahwa Tuhan tidak melihat dari gender, wajah, ras, atau apapun dari penampilan seseorang melainkan dari niat mereka untuk berjuang melawan segala yang menindaslah yang dinilai. Inilah logika yang mereka miliki.

Perlawanan berbasis agama kemudian menyatu dan menguat dengan kondisi multi-dimensional dari kerentanan yang mereka hadapi sebagai pekerja migran di luar negaranya. Mereka membangun jaringan diantara

sesama pekerja migran yang mengalami kerentanan yang sama, sehingga dapat terbangun solidaritas berbasis aspek afeksi. Pekerja migran di satu sisi sering dianggap sebagai pahlawan namun di sisi lain mereka menderita akan kerentanan yang mereka hadapi. Dari rasa sepenenderitaan itulah mereka kemudian saling bantu satu sama lain dalam menghadapi kesulitan. Dari sinilah organisasi berupa jaringan terorganisir lintas negara terbentuk, bukan hanya terkait dengan remitansi ekonomi, namun juga remitansi sosial dalam arti mereka berbagi pengalaman perasaan akan kehidupan sebagai prekariat. Jaringan tersebut memiliki potensi untuk menyusup lewat kegiatan yang bersifat positif maupun negatif secara sosial.

Migrasi dan terorisme erat kaitannya ketika dibicarakan dalam kerangka kejahatan terorganisir lintas negara. Migrasi atau lalu lintas manusia melewati tapal batas negara adalah aktivitas pergerakan manusia yang memiliki kerentanan diboncengi/ dibajak oleh kejahatan lintas batas negara seperti perdagangan manusia, perdagangan narkoba, perdagangan senjata ataupun terorisme (Irianto et al. 2005). Dalam konteks hubungan antara migrasi dan kejahatan terorganisir lintas negara, setidaknya dalam satu dekade ini, para pekerja migran Indonesia menghadapi kerentanan yang begitu mengkhawatirkan, terutama menjadi korban kejahatan perdagangan manusia. Sementara dalam kejahatan perdagangan narkoba mereka dikriminalisasi dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati ketika dijebak menjadi kurir narkoba.¹ Selain itu, pekerja migran Indonesia yang terjebak dalam sindikat perdagangan manusia juga memiliki kerentanan untuk dipaksa melakukan kejahatan politik tingkat tinggi seperti yang dialami Siti Aisyah yang diperintahkan untuk membunuh saudara Kim Jong Un di Malaysia.

Setidaknya dalam lima tahun terakhir, muncul ancaman baru yang dihadapi para pekerja migran Indonesia pada kejahatan terorganisir lintas negara, yaitu terpapar ideologi radikalisme/ ekstremisme yang merupakan bagian dari kejahatan terorisme. Jika menyimak sejarah radikalisme dan ekstremisme berbasis agama di Indonesia, kaitannya dengan mobilitas lintas negara bukan hal yang baru. Dalam kajiannya mengenai militansi keagamaan pada kelompok salafi di Indonesia sehingga mereka mau bertempur membela agama di luar negaranya, Solahudin (2011) menemukan fakta bahwa Abu Bakar Baasyir dan Abdullah Sungkar ketika berada di pelarian di Malaysia melakukan kaderisasi sekaligus radikalisasi terhadap beberapa warga negara Indonesia yang bekerja sebagai pekerja migran di Malaysia.

Berubahnya pola rekrutmen terhadap para pendukung gerakan ekstremisme keagamaan yang sebelumnya bertumpu pada pengorganisasian langsung menjadi rekrutmen daring melalui pemanfaatan teknologi informasi sekaligus sebagai cara yang lebih aman, ternyata makin mendekatkan buruh migran pada kerentanan pada aksi-aksi ekstremisme. Mereka menjadi sangat potensial untuk direkrut, mulai dari pendukung pasif, pendukung finansial bahkan ada yang bersedia menjadi pelaku lapangan aksi-aksi kekerasan. Noor Huda Ismail, aktivis dan peneliti terorisme di Indonesia menemukan fakta-fakta baru perekrutan petempur atas nama agama melalui media sosial. Fakta-fakta baru ini divisualisasi Noor Huda Ismail dalam media film. Jika dalam film "Jihad Selfie" (2016) diungkap fakta-fakta perekrutan anak-anak muda yang sedang belajar di Mesir dan Turki untuk menjadi petempur di Suriah, maka lewat film "Pengantin"(2018) terungkap fakta modus perekrutan PRT migran Indonesia sebagai pendukung gerakan petempur ISIS melalui perkawinan daring.

Dalam *World Migration Report 2018* mengenai situasi migrasi global tahun 2018 (IOM 2018), khususnya pada artikel yang berjudul *Migration, Violent Extremism and Social Exclusion* termuat beberapa hal mengenai migrasi dan ekstremisme. Bagian ini mengungkap tipe-tipe khas migrasi dan kaitannya dengan ekstremisme, yaitu: ekstremisme kekerasan yang menjadi pendorong proses migrasi dan perpindahan, risiko radikalisasi di kamp-kamp pengungsi dan tempat-tempat berkumpulnya kaum migran, risiko penyusupan pelaku teroris pada kaum pengungsi dan migran, tantangan yang dihadapi saat proses integrasi dan potensi keterpisahan sosial saat proses pelepasan (IOM 2018).

Berawal dari Kepanikan Moral, Kerentanan dan Deprivasi Multi-dimensional

Perempuan pekerja migran Indonesia di Hong Kong yang telah kembali ke kampung halaman di Jember (Jawa Timur), Wonosobo (Jawa Tengah), dan Indramayu (Jawa Barat) memiliki cerita yang menarik tentang bagaimana mereka mengalami lompatan peradaban dari kehidupan desa yang relatif tradisional menghadapi kota kosmopolitan di mana mereka bekerja sebagai pekerja migran. Studi ini menganalisis hasil wawancara mendalam kepada empat perempuan mantan pekerja migran di Jakarta, Indramayu, dan Wonosobo. Mereka pernah bekerja di beberapa negara seperti Hong Kong dan Singapura. Di tengah kosmopolitanisme modern Kota Hong Kong, mereka tinggal dengan orang-orang yang berasal dari negara yang berbeda dengan bahasa,

adat istiadat dan keberagaman kepercayaan. Mereka mendapatkan pengalaman baru hidup di kota modern yang memiliki perbedaan fundamental dibandingkan dengan kehidupan di desa.

Di sana harus kuat apalagi kita di rumah orang. Beda bahasa kan nggak gampang juga. Saya juga punya Tuhan gitu, tapi kadang mikirnya *aduh* di sana bisa solat nggak. Paling ya bekalnya optimis aja. Awalnya memang sebelum terbang itu banyak ketakutan. (MYS, Indramayu 2019, wawancara 5 Juli)

Di Hong Kong, mereka berjumpa dengan para perempuan lain yang telah mereka kenal sejak di Indonesia dan tahu bahwa di antaranya telah bersuami, namun memiliki pasangan lain di sana. Ada yang menikah secara diam-diam, dan melakukan poliandri. Ada juga ada yang tidak berani untuk mencari pasangan heteroseksual baru, karena menganggapnya sebagai dosa, lalu memilih pasangan lesbian, yang dianggap 'lebih sedikit dosanya'. Film dokumenter *Mengusahakan Cinta* (Kalyana Shira Film, 2009) besutan sutradara Ani Ema Susanti menggambarkan lesbianisme di kalangan Perempuan Pekerja Migran di Hong Kong. Beberapa perempuan pekerja migran yang berperilaku religius menganggap situasi yang mereka hadapi sangat mengejutkan secara moral. Mereka tidak dapat menerima gaya hidup tersebut karena melanggar ajaran agama yang mereka anut selama ini. Dalam situasi tersebut, mereka mengalami kepanikan moral, takut akan terpengaruh oleh mereka yang mempraktikkan lesbianisme dan poliandri, hanya karena mereka memiliki dorongan seksual yang sama di dalam diri.

Mereka mengalami konflik batin antara dorongan biologis yang selalu muncul dan nilai-nilai moral agama yang mereka pelajari di kampung halaman. Mereka merasa berada di ujung risiko besar akibat gaya hidup kosmopolitan, karena ajaran Islam melarang segala perbuatan yang mereka saksikan di sekitar mereka. Beberapa perempuan pekerja migran yang tidak mempraktikkan gaya hidup seperti itu bergunjing dan membicarakan perilaku tersebut dari perspektif agama ketika mereka mengalami keterkejutan di enam bulan pertama mereka tinggal di Hong Kong.

Kehidupan sehari-hari di Hong Kong tersebut cukup mirip dengan kehidupan perempuan pekerja migran di Singapura. Salah satu informan juga menyaksikan pengalaman serupa di Singapura menyebutnya sebagai gaya hidup yang mengikuti nafsu, akan tetapi beberapa tahun setelahnya ia mengaku tak lagi peduli terhadap gaya hidup tersebut karena sudah memiliki kesibukan sendiri (MW, wawancara 2015). Dalam pertemuan sosial

di akhir pekan mereka menyebutnya sebagai gaya hidup libido (*libido-lifestyle*), yang secara ideologi bertentangan dengan ajaran Islam, bahkan menimbulkan kepanikan moral bagi para perempuan pekerja migran Muslim yang taat. Beberapa media massa arus utama juga acapkali membuat liputan dengan prasangka yang negatif terhadap gaya hidup pekerja migran di Hong Kong.²

Terdapat polarisasi antara perempuan pekerja migran yang menentang gaya hidup hedonis dan dianggap hanya mengumbar libido, hingga benar-benar tidak mau bergaul dengan kelompok yang mereka tuduh sebagai hedonis. Di sisi lain, terdapat perempuan pekerja migran yang beranggapan bahwa gaya hidup orang lain bukanlah urusan mereka, karena pada kenyataannya, tiada yang dapat mereka lakukan untuk mengubahnya selain hanya mengunjingkan di belakang.

Karena kita jauh dari keluarga, kita bebas. Kita punya uang dan kita ga ada yang mengawasi. Di Hong Kong ya mau hitam bisa jadi sehitam-hitamnya dan sebaliknya. (SS, Wonosobo 2019, wawancara 9 Juli)

Dalam situasi yang menghadapkan mereka pada ketidakmampuan untuk mengubah perilaku teman-teman mereka, mereka pun kehilangan semangat. Kemudian muncul perasaan marah, frustrasi dan krisis identitas dalam diri mereka karena tidak dapat melakukan apapun. Dalam kehidupan kota kosmopolitan, tindakan individu adalah urusan pribadi masing-masing, bukan urusan kolektif sebagai sesama perempuan pekerja migran dari Indonesia. Dari sini mereka belajar menjadi lebih individual, walaupun sulit karena tidak mudah untuk lepas dari pengaruh kolektif. Para perempuan pekerja migran Muslim yang taat lalu membentuk grup eksklusif yang fokus pada menghindari gaya hidup kosmopolitan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Pada situasi inilah sebagian dari pekerja migran dari Indonesia mengalami keterpisahan dari kolektifitas sosialnya. Secara keagamaan mereka mengalami peristiwa traumatik dan ada hasrat untuk memulihkan trauma tersebut dengan membentuk kolektifitas sosial baru yaitu berkelompok dan penguatan keagamaan sekaligus.

Situasi kosmopolitan juga membuat kehidupan mereka terampas secara moral, dan lebih buruk lagi ketika mereka bekerja di rumah majikannya. Sebagai perempuan pekerja migran, mereka sadar bahwa mereka dibayar atas pekerjaan yang disepakati bersama. Mereka juga tahu bahwa majikan mereka bertoleransi terhadap agama Islam yang mereka anut, meski ada juga beberapa majikan yang tidak membolehkan mereka

untuk beribadah selama jam kerja, misalnya pada saat masak. Untuk masalah waktu shalat, biasanya masih bisa mereka atasi. Akan tetapi, bekerja sebagai pekerja rumah tangga, mereka tidak bisa menolak untuk memasak daging babi. Majikan mereka hanya sekadar tahu bahwa Muslim tidak boleh memakan babi, sehingga memasak babi dianggap bukan sebuah larangan agama. Sedangkan para perempuan pekerja migran ini meyakini bahwa menyentuh daging babi adalah haram. Situasi ini menambah kontradiksi yang makin terakumulasi dalam diri mereka, suatu kondisi genting secara keagamaan yang tidak dapat dipahami semua orang bahwa hal itu merupakan peristiwa peminggiran sosial dan budayanya dalam konteks kebudayaan kota kosmopolitan yang berbeda.

Takutnya itu saya ini kalau makan babi itu *dosa nggak* gitu mbak takutnya *salah nggak* dan majikannya itu pun sama majikan kayak selalu tanya, kamu makan daging babi nggak? kamu makan ini nggak? (MYS, Indramayu 2019, wawancara 5 Juli).

Situasi ini tidak mudah untuk dihadapi, walaupun kemudian mereka mengatasinya dengan membeli peralatan masak pribadi agar tidak terkontaminasi dengan makanan yang mengandung babi. Tetapi bukan berarti tidak ada 'kekacauan' agama yang terjadi.

Awal berangkat udah pusing. Akhirnya punya pemikiran untuk punya wajan sendiri, masak di wajan sendiri, terus kalau ngasih makan si *doggy* (anjing peliharaan majikan) aku pakai *glove*. (SAE, Jakarta 2019, wawancara 24 Mei).

Situasi pekerja migran yang terpinggirkan dalam konteks keagamaan kemudian menyatu dengan persoalan sosial ekonomi masa depan. Mereka menghadapi ketidakpastian hidup, dimana masa depan selalu menjadi pertanyaan besar. Ketidakpastian masa depan ini pertama kali muncul ketika mereka harus memiliki modal ekonomi untuk berangkat ke negara tujuan. Mereka harus membayar sekitar 20-50 juta rupiah bekerja di Hong Kong. Agensi penyedia tenaga kerja menyediakan pinjaman, yang nantinya akan dideduksi dari gaji mereka pada lima bulan pertama. Hal ini berarti seluruh gaji bulanan mereka, yang sebesar 5-8 juta rupiah, akan diambil untuk melunasi pinjaman. Maka selama lima bulan pertama tersebut, hidup mereka sangat bergantung pada majikan. Situasi ini membuat mereka harus mematuhi majikan karena mereka tidak memiliki kemampuan untuk meninggalkan negara tersebut.

Harus tanda tangan di depan *lawyer* atau notaris gitu direkam pakai *handycam* bahwa kita punya hutang dua puluh satu juta selama tinggal di penampungan yang

dibayar dengan potong gaji, jadi *pressure* sendiri.. aku berangkat itu untuk membayar hutang orangtua, kok ini malah ditambahi hutang. (SAE, Jakarta 2019, wawancara 24 Mei)

Kondisi ini lebih menyedihkan dibandingkan dengan kaum proletar di abad ke-19, karena mereka harus memiliki modal sebelum bekerja, dan mereka juga harus hidup dalam kondisi sulit. Dalam bahasa Standing (2014) mereka adalah prekariat yang hidup dalam ketidakpastian. Perempuan pekerja migran berada dalam tekanan, tidak memiliki kekuatan untuk memastikan masa depannya, sehingga tidak ada kejelasan akan hidup mereka. Satu-satunya cara untuk menjamin masa depan mereka adalah dengan beragama secara *kaffah*. Ketika perempuan pekerja migran berkenalan dengan jaringan ISIS di Hong Kong, mereka beragama untuk melakukan perlawanan terhadap sistem ekonomi dan demokrasi yang menindas mereka. Meski mereka perempuan, bukan berarti mereka tidak mampu melawan. Kondisi sebagai prekariat yang mengalami deprivasi multi-dimensional membuat mereka menempuh jalan perlawanan yang disahkan secara agama.

Agama membuka jalan bahwa Tuhan menilai apa yang mereka kerjakan melalui niat di dalam hati, bukan karena wujud tubuh, termasuk bukan pula gendernya. Dalam situasi ini, tidak diperlukan proses cuci otak karena yang terjadi adalah perjumpaan antara deprivasi multi-dimensional dengan situasi prekariat yang menimbulkan ketidakpastian pada masa sekarang dan masa depan. Ketika berjumpa dengan jaringan ISIS mereka menemukan jawaban sehingga merasa bahwa dengan membangun jejaring lintas negara maka mereka menjadi agensi yang penting dalam jaringan. Oleh karena itu pelaku kekerasan ekstrem tidak segan-segan menyumbang berbagai tindakan yang berupa perlawanan terhadap pemerintah yang dianggap *thogut*.

Mengapa Perempuan Tak Lagi Pasif?

Kajian ini menemukan bahwa perasaan terancam haknya sebagai warganegara sangat kuat dirasakan oleh pekerja migran. Hal ini berkaitan erat dengan perkembangan neoliberalisme, yang melepaskan ikatan mereka sebagai demos dengan negara sehingga melemparkan mereka ke pasar tenaga kerja. Tidak hanya di negara-negara Islam di Timur Tengah, neoliberalisme ekonomi di Indonesia juga telah membawa kaum perempuan muda pada kehidupan yang rentan (prekariat). Kerentanan yang mereka alami di kampung halamannya, kemudian mereka jawab dengan menjadi

pekerja migran di negara lain. Namun apa yang mereka alami tidak berubah. Kerentanan-demi kerentanan dalam hidup tetap mereka alami.

Di negara lain mereka menjadi bukan siapa-siapa, bukan orang Indonesia, bukan warga Hong Kong. Mereka hanya merasakan dalam konteks agama, bahwa dirinya adalah umat Allah yang berada dalam kerentanan. Situasi ini menjadi basis dari terbentuknya emosi politik yang menjadi dasar dari jaringan kebersamaan sebagai umat Allah yang rentan. Mereka rentan karena mereka lebih menjadi warganegara pasar, yang membuatnya tercerabut dari berbagai hak yang mereka miliki sebagai warganegara. Dalam konteks inilah mereka menerima gagasan bahwa jika negara Islam didirikan maka persoalan mereka akan selesai. Mereka pun berjuang sampai bersedia melakukan bom bunuh diri. Tentu hasil perjuangannya bukan untuknya, melainkan untuk generasi Islam selanjutnya. Inilah yang ada di dalam pikiran mereka untuk memulihkan haknya sebagai warga.

Tren baru ini meningkatkan angka keterlibatan perempuan dalam aktivitas terorisme yang terjadi tak hanya di Indonesia, namun juga di negara-negara di mana mereka bekerja atau di area-area konflik, seperti Suriah dan Mindanao. Bom Surabaya pada Mei 2018 sangat mengejutkan karena salah satu pelaku utamanya adalah perempuan dan melibatkan keluarganya (anak-anaknya). Dalam penelitian yang dilakukan dua tahun sebelumnya, Dian, seorang perempuan yang pernah bekerja di Singapura dan Taiwan, terlibat dalam perancangan bom panci yang rencananya akan diledakkan di Istana Merdeka (Migrant CARE 2018). Ada juga Ika, seorang perempuan yang bekerja di Hong Kong, yang terpapar radikalisme melalui media sosial sehingga ia menjadi seorang penggerak dan penyumbang dana untuk gerakan terorisme (Migrant CARE 2018).

Salah seorang informan dalam studi menceritakan alur kehidupan beragamanya. Saat masih di bangku SMA sekitar tahun 2000-an di kampung halamannya, ia tak pernah berpikir untuk menjadi perempuan pekerja migran hingga ia mengalami masalah keluarga yang tak dapat ia selesaikan. Saat itu, ia mendapatkan pendidikan agama Islam dari seorang guru yang berafiliasi dengan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Awalnya ia mengira bahwa ajaran Islam di mana pun sama. Tanpa disadari, ia diajari untuk menjadi seorang fundamentalis agama karena ia tak bisa membedakan ajaran Islam yang didapat dari orang tua dan lingkungan sosial dengan ajaran Islam yang didapatkan dari gurunya yang HTI.

SMP di desa, kalau SMA di kota... saya tuh menemukan kehidupan keberagaman baru waktu saya SMA... ikutan rohis yang ada hubungannya dengan HTI. (SAE, Jakarta 2019, wawancara 24 Mei).

Ia sering bertanya pada gurunya mengenai apakah praktik Islam tradisional di kampungnya bertentangan dengan ajaran Islam atau tidak, yang dijawab oleh gurunya bahwa hal tersebut bertentangan karena dianggap sebagai *bid'ah*. Sebagai seorang anggota HTI, ia pun diminta untuk mengubah praktik Islam dalam keluarganya untuk menghindari *bid'ah*. Ia mencoba untuk mengubah keluarganya terlebih dahulu, namun tidak berhasil. Gurunya juga mengajari bahwa sistem ekonomi politik Indonesia jauh dari ajaran Islam, namun tak banyak orang yang menyadarinya.

SMA tuh diriku kayak udah hidup dengan duniaku gitu, jadi kepikiran orang tuaku kok kayak gini, marahan tiap hari, kok makan aja susah, aku pengen jadi apa ya? (SAE, Jakarta 2019, wawancara 24 Mei).

Ajaran Islam yang serupa juga didapatkannya ketika mengikuti kegiatan sosial keagamaan di Hong Kong. Beberapa khotbah terdengar mirip walaupun kegiatan yang ia ikuti tidak berkaitan dengan HTI. Ia menyadari bahwa pemahamannya terhadap Islam telah berubah dibanding dengan yang ia praktikkan sebelumnya, yang sarat dengan pengaruh tradisi Jawa namun disebut sebagai *bid'ah* oleh gurunya. Ia merasa ada perbedaan dalam beragama, dibanding dengan ajaran yang diperoleh dari tradisi Nahdlatul Ulama di kampung halamannya. Agama yang dipraktikkan sekarang lebih ketat dan mencoba untuk menghindari dan menentang *bid'ah*. Bahkan pada titik tertentu, ia meyakini bahwa agama yang dipraktikkan saat itu adalah yang paling benar jika dibandingkan dengan agama lain atau bahkan dengan metode Islam lainnya.

Kalau tahu organisasi majelis taklim itu kan hari Minggu kita ke Mushola KBRI diberitahu sama temen..kalau majelis taklim yang sering datengin ustad di masjid Kowloon Mosque itu. (SAE, Jakarta 2019, wawancara 24 Mei).

Praktik Islam eksklusif ini berlangsung hingga akhir tahun pertamanya di Hong Kong, lalu ia mulai untuk menjadi lebih terbuka. Majikan di tempatnya bekerja selalu membolehkannya untuk beribadah serta memberi waktu untuk mengikuti kegiatan keagamaan. Toleransi yang diperoleh dari majikannya membuka matanya bahwa dunia penuh dengan keberagaman, dan yang paling penting adalah rasa hormat dengan satu sama lain. Majikannya membolehkannya untuk mengikuti

berbagai kegiatan luar rumah asalkan pekerjaannya di rumah telah selesai.

Ia pun mulai aktif mengikuti banyak kegiatan budaya yang diadakan perempuan pekerja migran Indonesia di Hong Kong, mulai dari perkumpulan tari tradisional, perkumpulan membuat pakaian Muslim, yang ia dokumentasikan dalam bentuk film. Banyaknya kegiatan budaya yang ia ikuti telah mengubah pandangannya menjadi semakin terbuka, meskipun ia tetap mempraktikkan Islam dengan disiplin, namun menjadi toleran terhadap dunia sosial yang penuh keberagaman. Ada beberapa temannya yang mengembangkan kelompok sosial yang lebih inklusif dan multi-kultural, namun ada juga beberapa Muslim yang melakukan hal sebaliknya.

Perempuan pekerja migran yang memiliki perspektif multi-kultural biasanya bertemu dengan sesama pekerja migran dengan latar belakang agama dan budaya yang berbeda-beda untuk kegiatan budaya. Selain itu, mereka juga mengakses internet untuk berbagai tujuan. Sabtu dan Minggu adalah hari spesial bagi perempuan pekerja migran Indonesia yang bekerja di Hong Kong karena mereka memiliki waktu kosong untuk berkumpul dengan sesama pekerja migran. Mereka menggunakan waktu tersebut untuk memenuhi kebutuhan bersosialisasi di Victoria Park. Pada semester pertama hingga akhir tahun pertama, mereka masih bergaul dengan pekerja migran Indonesia yang mempraktikkan gaya hidup kosmopolitan di Hong Kong, walaupun semuanya adalah Muslim. Namun mulai semester kedua dan seterusnya mulai ada perubahan di mana para Muslim yang taat mulai memisahkan diri dari mereka yang menjalankan gaya hidup kosmopolitan sekuler.

Saya di sana juga bikin komunitas sendiri kayak komunitas hijrah, tujuannya cuman untuk mengajak orang Indonesia berpakaian lebih sopan sesuai sunah rosul gitu. Misalnya ada orang baru saya ga memaksakan harus bercadar gitu cuman silahturahmi aja secara muslim gitu. Paling itu aja sih. Ada komunitas sendiri. (MYS, Indramayu 2019, wawancara 5 Juli).

Mereka yang setia dengan ideologi dan ajaran Islam hanya mau bergaul dengan kelompok yang memiliki pemahaman agama yang sama. Mereka juga tidak mau bergaul dengan orang yang beragama lain. Mereka menolak dan menghindari pluralisme dan multi-kulturalisme karena percaya bahwa hal ini membahayakan ajaran Islam. Bagi orang-orang dalam kelompok Islam taat ini, waktu luang mereka pada hari Sabtu dan Minggu biasanya digunakan untuk mengikuti

kegiatan keagamaan secara langsung atau daring, tergantung instruksi yang mereka terima dari jaringan Islam yang mereka ikut. Mereka mengikuti program pengajian yang ada di daerah mereka.

Kalau hari Minggu ngumpul bikin tenda, kan ada lapangan rumput buat istirahat gitu. Tapi kalau memang ada kajian saya kajian ke masjid. (MYS, Indramayu 2019, wawancara 5 Juli).

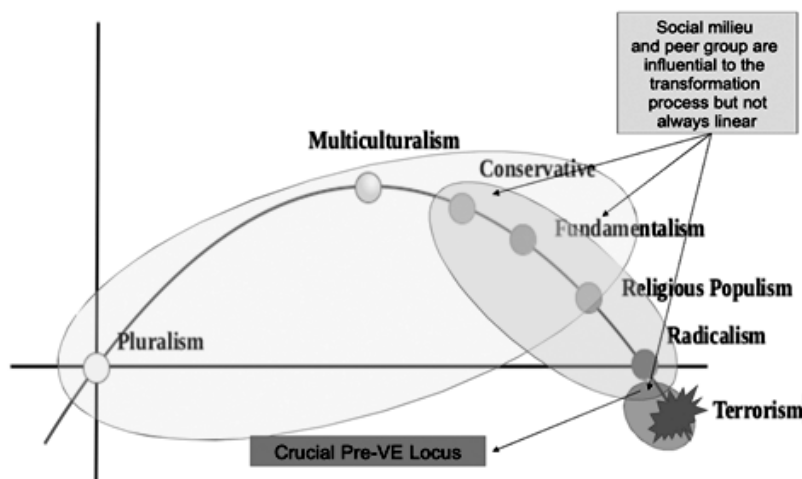
Seiring dengan semakin kuatnya keyakinan mereka terhadap ajaran agama Islam, mereka mulai memisahkan diri dari hal yang dianggap tidak sesuai dengan moral Islam. Mereka secara aktif membangun identitas politik Islam dengan membentuk kelompok religius melalui pakaian yang mereka kenakan, melalui pertemuan rutin mingguan, dan kegiatan-kegiatan berkelompok lainnya, yang merupakan bentuk aktivisme Islam eksklusif. Mereka juga menggunakan modal sosial yang mereka dapatkan dari aktivisme sosial religius ini. Hal ini meningkatkan politik pemaknaan berdasarkan politik identitas Islam. Melalui aktivisme keagamaan, mereka tidak hanya membaca dan mengkaji Al-Quran tetapi juga menggunakan Al-Quran dan Hadis untuk mendekonstruksi pengalaman hidup mereka sebagai perempuan pekerja migran yang bekerja di negara non-Islam. Dari sini, mereka membangun kesadaran bahwa mereka hidup dalam lingkungan yang berisiko merusak keyakinan mereka karena jauh dari ajaran Islam, dengan ancaman neraka. Dari Ustadz di pengajian, mereka mendapatkan pengetahuan bahwa sistem ekonomi kapitalisme dan sistem politik demokrasi beserta prosedur-prosedur ekonomi politik yang ada adalah semata-mata untuk marginalisasi Muslim.

Kajian keislaman yang mereka ikuti cenderung mengulang analisis untuk melawan sistem yang menyebabkan para Muslim menjadi rusak (karenanya berisiko masuk neraka) dan hidup dalam kerentanan. Sebagian aktivisme sosial-agama dilakukan sebagai agenda menyebarkan ideologi kekhalifahan yang secara politik bertentangan dengan konstitusi Indonesia. Di sanalah mereka mendapatkan kesadaran ideologi

berdasarkan kepercayaan yang menyebabkan para perempuan pekerja migran ini mengalami perubahan fundamental, disusul dengan kesadaran politik yang memaknai negara modern dan kapitalisme sebagai konsep yang bertentangan dengan Islam. Ideologi kepercayaan seperti ini terus merasuki kesadaran politik mereka. Kesadaran yang menjadi alasan bagi mereka untuk melawan musuh Islam dengan segala cara demi membangun negara Islam. Dalam hal ini, mereka menyadari bahwa mereka lebih lemah dibandingkan dengan kekuatan musuh, namun dengan jalan kekerasan ekstrem, mereka dapat menunjukkan kepada dunia bahwa mereka kuat dan menakutkan.

Tiap hari diisi pengajian tauhid. Terus katanya kalau tidak mengafirkan orang kafir itu dosa. Darahnya itu halal bagi kita... perasaannya sih percaya ga percaya ya. Saya kan masih awam gitu jadi ya kok *medeni* (menakutkan) banget gitu. Pokoknya yang tidak sejalan itu buat kita kafir. Harus dibunuh... tapi katanya kalau yang cewek itu ga boleh membunuh. (MJ, Wonosobo 2019, wawancara 3 Juli)

Setelah menjadi lebih ideologis dalam memahami kepercayaan agama, mereka menjadi anti pluralisme dan multi-kulturalisme. Meski demikian bukan berarti sikap mereka tidak dapat diubah kembali karena perubahan ini tidak linear maupun permanen. Ajaran Islam pada dasarnya mengakui masyarakat plural dan menghormati orang lain yang berbeda dengan Islam, sehingga masih ada kesempatan untuk mengembalikan mereka ke prinsip Islam tersebut. Masalahnya kemudian, karena kegiatan keagamaan yang diikuti, mereka menjadi intoleran terhadap segala bentuk perilaku sosial yang bertentangan dengan Islam. Bahkan mereka diajarkan untuk membenci orang-orang dengan agama yang berbeda atau memiliki perilaku yang menyimpang dari ajaran Islam. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian aktivisme sosial-agama ini mempengaruhi anggotanya untuk menjadi konservatif terlebih dahulu, lalu setelah itu diarahkan menjadi fundamentalis di mana mereka menjadi mudah untuk dimobilisasi untuk terlibat dalam populisme agama atau bahkan ke level radikal.



Gambar 1. Transformasi Sikap Religius

Sumber: hasil observasi Aris Arif Mundayat (2016-2020)

Dalam transformasi sikap religius seperti ini, fundamentalisme masih dapat diterima di level kemasyarakatan. Sebagai contoh, salah satu informan mengatakan bahwa saat berada di asrama Muslim, setiap kali dirinya melewati gereja, ia tidak pernah mau melihat gereja tersebut. Akan tetapi, ia kini sudah berubah menjadi seseorang yang dapat mengakui perbedaan dalam kehidupan bermasyarakat karena ia bergaul dengan orang-orang yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Situasi tersebut juga dialami oleh perempuan pekerja migran Indonesia di Hong Kong, setelah mereka bergabung dalam organisasi agama yang merekrut orang-orang untuk ekstremisme kekerasan, maka mereka cenderung menjadi eksklusif dan hanya menerima orang-orang dengan identitas keagamaan yang sama. Transformasi sikap religius adalah sebuah konstruksi sosial; mereka yang tertarik bergabung dalam kelompok ekstremisme kekerasan atas nama agama, akan dihubungi secara privat oleh anggota jaringan ISIS. Untuk membuat mereka terikat dengan kelompok ini, mereka biasanya diatur untuk menikah, seperti pada kasus Ika dan Dian.

Dalam studi tentang radikalisme perempuan pekerja migran Indonesia di Hong Kong, IPAC (2017) mengekspos proses radikalisasi yang terjadi dan melacak jaringan serta proses penunggaan organisasi perempuan pekerja migran. Pertumbuhan organisasi perempuan pekerja migran yang membawa identitas agama sejalan dengan proses "hijrah" dari masa lalu mereka yang dianggap gelap. Akan tetapi, organisasi ini tidak secara langsung mentransformasi mereka ke terorisme, melainkan melalui kegiatan sosial keagamaan yang dibajak untuk

menyelundupkan ide-ide mereka untuk melawan aparat negara modern melalui ekstremisme kekerasan.

Mereka yang bergabung dalam sel tertentu dipilih oleh anggota senior jaringan ini, karena dianggap dapat mengajak orang lain untuk bergabung, lalu fokus kepada mereka yang bersedia melakukan ekstremisme kekerasan seperti bom bunuh diri. Beberapa kegiatan sosial keagamaan Islam di Hong Kong "dibajak" oleh kelompok ISIS, karena mereka tahu bahwa para perempuan pekerja migran adalah aset penting bagi mereka untuk memperluas jaringan. Ini berarti bahwa para perempuan pekerja migran direkrut karena mereka mampu membangun jaringan, memobilisasi orang, dan menyumbang dana untuk perjuangan ISIS. Ika dan Dian sebagai perempuan mantan pekerja migran yang bergabung dalam ISIS, misalnya, dulunya sangat pluralis dan menerima gaya hidup modern masa awal hingga setahun pertama tinggal di Hong Kong. Namun setelah bergabung dalam aktivisme sosial ISIS, mereka berdua mengalami transformasi sikap religius. Mereka adalah generasi pertama perempuan pekerja migran Indonesia yang melakukan aksi bom bunuh diri, suatu perubahan yang signifikan dari perempuan yang biasa bekerja di rumah tangga hingga menjadi agen militan dalam jaringan ISIS. Mereka bahkan mengontrol dan mendanai anggota jaringan yang siap melancarkan bom bunuh diri di Indonesia.

Menurut penelitian Leebarty Taskarina dalam bukunya *Women and Terrorism* (2018), keterlibatan aktif perempuan dalam terorisme telah mengubah wajah terorisme yang selama ini diidentifikasi dengan maskulinitas pria. Disebutkan dalam buku mengenai

rusaknya kehidupan seorang perempuan muda yang menjadi istri Santoso, pemimpin Mujahidin Indonesia Timur yang menyerukan aksi terorisme dari hutan sekitar Poso. Dari seorang istri yang tidak mengerti apa pun, berubah menjadi kombatan di hutan. Buku ini mengangkat sebuah pertanyaan dikotomi terkait aktivitas perempuan dalam terorisme, apakah ia adalah korban yang terseret akibat tindakan suaminya, atau seorang pelaku aktif dengan atau tanpa sepengetahuan suaminya.

Analisis situasional terhadap keterlibatan pekerja migran perempuan dalam aktivisme sosial-agama sebagaimana dibahas di atas menunjukkan bahwa perempuan yang terlibat dalam aktivisme sosial-agama menjadi lebih berdaya dan militan sebab mereka memiliki semangat untuk menghentikan perasaan deprivasi multi-dimensional dan kerentanan mereka. Sehingga mereka menjadi agen aktif karena menjadi berdaya melalui pengalaman hidup dan aktivisme agama-sosial yang mereka ikuti. Oleh karena itu, perempuan yang terlibat dalam ekstremisme kekerasan tidak dapat dianggap sebagai 'korban dari pria' atau 'diundang oleh pria' saat bergabung ke dalam perang karena mereka sangat aktif, militan dan memiliki kesadaran religius demi perjuangan kelas mereka. Terlebih, dalam aktivisme sosial Islam sosial, ditanamkan doktrin bahwa Tuhan tidak memandang penampilan seseorang, melainkan hanya hati dan tindakannya. Doktrin yang dicukil dari hadis ini digunakan anggota ISIS untuk mendorong gender apa pun untuk melawan musuh Islam. Doktrin ini mendorong perempuan menjadi lebih aktif sebagaimana para perempuan ini menemukan peran mereka sebagai agen dan aktor yang memproduksi nilai-nilai militan dalam mendukung ISIS. Hal ini membawa mereka pada poin di mana mereka berkomitmen dalam melancarkan ekstremisme kekerasan sebagai strategi terorisme, apa pun risikonya.

Bunuh Diri Keluarga: Simbol Teror Terburuk

Ada sebuah grup *Whatsapp* bernama 'Keluarga Bahagia' yang merupakan media komunikasi dan rekrutmen para kandidat teroris yang telah memutuskan untuk setia dengan ISIS. Grup *Whatsapp* lain bernama "Membuat Adonan Kue" berisi panduan untuk melancarkan aksi terorisme. Kesaksian yang diperoleh dari para tersangka yang tertangkap dalam berbagai operasi penangkapan jaringan terorisme di Indonesia dan kesaksian/pengakuan dari para mantan teroris mengkonfirmasi bahwa wadah media sosial (salah satunya adalah grup *Whatsapp*) telah menjadi wadah

yang sangat kuat untuk proses rekrutmen dan radikalisasi para calon teroris untuk merealisasikan niat ekstremisme kekerasan mereka.

Dari interaksi yang terungkap melalui percakapan dalam grup tersebut ada permintaan seorang pelaku teror untuk dinikahkan dengan seorang perempuan yang turut berpartisipasi dalam penyerangan terhadap polisi pengawal Wiranto.³ Ini adalah sebuah indikasi bahwa kebahagiaan keluarga bagi teroris adalah dengan melancarkan aksi terorisme bersama pasangan. Meski ironis, akan tetapi fenomena ini telah menjadi salah satu karakteristik aksi terorisme di Indonesia, setidaknya dalam lima tahun terakhir. Pada satu dekade terakhir, teroris perempuan diposisikan dalam kerja domestik atau kerumahtanggaan. Akan tetapi, seiring perkembangannya, kehadiran perempuan di barisan depan aksi terorisme menjadi tidak terhindarkan.

Fakta tersebut menunjukkan bahwa kelompok teroris baru tak lagi terikat dengan gaya-gaya lama yang maskulin-patriarkis, dan berani menjebol interpretasi mereka atas perempuan dengan cara membolehkan mereka menjadi pelaku aktif tindak terorisme. Hal ini jelas merupakan sebuah tantangan bagi siapa saja yang bekerja memberantas terorisme. Perspektif lama tak lagi mencukupi dan dibutuhkan perspektif dan pendekatan yang komprehensif untuk mengidentifikasi fitur-fitur baru tindak terorisme yang melibatkan keluarga (termasuk anak-anak) sebagai aktor aktif.

Kesimpulan

Selain fakta bahwa perempuan pekerja migran hidup dalam kepanikan moral di kota kosmopolitan seperti Hong Kong, mereka juga hidup dalam kondisi *precarious* dimana mereka tidak memiliki kepastian masa depan. Agama, dalam situasi ini, adalah opsi meringankan deprivasi multi-dimensional yang mereka alami sebagai perempuan. Bagi mereka, melawan ketertindasan yang datang karena demokrasi tidak mampu menjawab persoalan dan kapitalisme yang telah meminggirkan mereka ke jurang deprivasi multi-dimensional. Sejumlah perempuan pekerja migran menemukan kesempatan melawan setelah berjumpa dengan jaringan ISIS. Dalam konteks ini, rekrutmen ISIS terhadap perempuan pekerja migran di Hong Kong menggunakan aktivisme sosial-agama di mana mereka tergabung. Agama dalam hal ini dipersepsikan sebagai jalan keluar menghadapi situasi prekariatisasi. Konteks inilah yang menjadikan apa yang mereka lakukan melalui terorisme perlu dipahami sebagai rentang spektrum gender.

Dengan merekrut perempuan pekerja migran ke dalam organisasi ISIS, mereka dimanfaatkan untuk memperluas jaringan, karena mereka memiliki kemampuan untuk melakukannya. Mereka tertarik bergabung karena merasa bahwa mereka bertarung melawan musuh agama yang membahayakan kehidupan umat Islam. Mereka menjadi militan dan bersedia melakukan kekerasan ekstrem sebagai strategi untuk melawan negara modern. ISIS membajak ceramah keagamaan untuk menyampaikan doktrin-doktrin yang sangat kuat efeknya dalam mendorong militansi perempuan untuk terlibat dalam jalan ekstremisme kekerasan.

Situasi ini sebaiknya menjadi sebuah peringatan penting bagi para pemangku kepentingan dalam memberantas terorisme dan melindungi pekerja migran. Langkah-langkah komprehensif dibutuhkan untuk mencegah ekspansi dan kerentanan para perempuan pekerja migran terhadap ekstremisme kekerasan. Langkah keamanan tak bisa lagi menjadi jalan satu-satunya untuk situasi ini karena siklusnya bermula dari area asal dan tujuan, proses deprivasi yang multidimensional. Oleh karena itu, tahapan pencegahan juga mengikuti siklus migrasi, yang melibatkan peran pemerintah lokal, masyarakat lokal, kementerian dan institusi terkait migrasi tenaga kerja, perwakilan Indonesia di luar negeri, dan organisasi tenaga kerja migran untuk mempromosikan banyak saluran-saluran sosial, budaya, dan ekonomi untuk menghilangkan deprivasi multidimensional mereka, termasuk kepanikan moral.

DAFTAR PUSTAKA

- Alonso, R & Rey, MG 2007, "The evolution of jihadist terrorism in Morocco", *Terrorism and Political Violence*, Vol. 19. No. 4, h.571-592. <http://dx.doi.org/10.1080/09546550701606580>.
- Boubaker, A 2011, *Al-Qaeda in the Islamic Maghreb and Algerian Salafi Networks*, Institute for Security Studies, Pretoria, diakses pada 6 Agustus 2020, <http://www.isn.ethz.ch/Digital-Library/Publications/Detail/?id=132848>.
- Butler, J 2004, *Undoing Gender*, Routledge, New York.
- Butler, J 1990, *Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity*, Routledge, New York.
- Conway, M & McInerney, L 2008, *Jihadi video and auto-radicalisation: Evidence from an exploratory YouTube study*, Paper presented at the First European Conference on Intelligence and Security Informatics, Esbjerg, diakses pada 4 Agustus 2020, <http://doras.dcu.ie/2253/>.
- Derrida, J & Spivak GC 1997, *Of Grammatology*, Johns Hopkins University Press, Baltimore.
- Hearne, E & Laiq, N 2010, *A new approach? Deradicalization programs and counterterrorism*, International Peace Institute, diakses pada 9 Desember 2019, <http://www.isn.ethz.ch/Digital-Library/Publications/Detail/?lng=en&id=126683>.
- International Organization for Migration 2017, *World Migration Report 2018*, diakses pada 9 Desember 2019, https://www.iom.int/sites/default/files/country/docs/china/r5_world_migration_report_2018_en.pdf.
- International Crisis Group (ICG) 2013, *Tunisia: Violence and the Salafi challenge*, Brussels, diakses pada 9 Desember 2019, <http://www.crisisgroup.org/~media/Files/Middle%20East%20North%20Africa/North%20Africa/Tunisia/137-tunisia-violence-and-the-salafi-challenge.pdf>.
- Institute for Policy Analysis for Conflict 2017, "The Radicalisation Indonesian Migrant Workers in Hong Kong", *IPAC Report No. 39*, http://file.understandingconflict.org/file/2017/07/IPAC_Report_39.pdf.
- Irianto, S et al. 2005, *Perdagangan Perempuan Dalam Jaringan Pengedaran Narkotika*, Yayasan Obor, Jakarta.
- Ismail, Noor H (Produser) 2018, film *Pengantin*, Prasasti Production, Jakarta.
- Ismail, Noor H (Produser) 2016, film *Jihad Selfie*, Prasasti Production, Jakarta. Film ini juga disajikan dalam bentuk komik. Ismail NH & Wahyudi B 2018, *Jihad Selfie*, Penerbit Noura, Jakarta.
- Marks, M 2013, "Youth Politics and Tunisian Salafism: Understanding the Jihadi Current", *Mediterranean Politics*, Vol. 18 No. 1, h.104-111. <http://dx.doi.org/10.1080/13629395.2013.764657> diakses pada 6 Agustus 2020.
- Merone, F & Cavatorta, F 2012, *Salafist mouvance and sheikh-ism in the Tunisian democratic transition*, Dublin City University, Dublin, <http://doras.dcu.ie/17570/1/1207.pdf> diakses pada 9 Desember 2019.
- Migrant CARE 2018, *Pemantauan Media Massa dan Sosial Media Terhadap Aktivisme Pekerja Migran Yang Mengarah Pada Radikalisme/ Ekstremisme*, Unpublished Report, Jakarta.
- Mullins, S 2019, *Jihadist Infiltration of Migrant Flow to Europe: Prepetrators, Modus Operandi and Policy Implications*, Palgrave MacMillan.
- Solahudin 2011, *Nili Sampai Ji; Salafy Jihadisme di Indonesia*, Komunitas Bambu, Depok.
- Standing, G 2014, *The Precariat, The New Dangerous Class*, Bloomsbury.
- Susanti, AE (Sutradara) 2009, film dokumenter *Mengusahakan Cinta*, Kalyana Shira Film, Jakarta.
- Taskarina, L 2018, *Perempuan dan Terorisme - Kisah Perempuan dalam Kejahatan Terorisme*, terjemahan Ahmad Nurcholih, Elex Media Komputindo, Jakarta.
- European Commission 2008, "Radicalisation, recruitment and the EU-counter radicalisation strategy", *European Commission Sixth Framework programme Transnational Terrorism, Security and the Rule of Law*, diakses pada 8 Desember 2019, <http://www.transnationalterrorism.eu/tekst/publications/WP4%20Del%207.pdf>.

Catatan Akhir

- 1 Lihat uraian tentang para perempuan yang terjebak dalam sindikat kejahatan lintas negara pada Wahyu Susilo, Dalam Perangkap Sindikat Kejahatan Lintas Negara, artikel di Harian Kompas, 12 Juli 2017.
- 2 Model liputan seperti ini yang makin memberi stigma negatif pada pekerja migran. <https://news.detik.com/berita/d-2185790/intip-kehidupan-tki-di-hong-kong-gadget-wah-hingga-seks-sejenis-diakses-12-agustus-2020>.
- 3 Mengenai kasus Abu Rara, bisa dibaca pada Wahyu Susilo, "Keluarga Bahagia Yang Membahayakan", artikel pada Harian Media Indonesia, 15 Oktober 2019.

Ucapan Terima Kasih pada Mitra Bestari

1. Prof. Sylvia Tiwon (University of California)
2. Prof. Dr. Musdah Mulia (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
3. Dr. Andi Achdian (Universitas Nasional)
4. Yacinta Kurniasih, M.A.(Monash University)
5. Dr. Nur Iman Subono (Universitas Indonesia)
6. Elisabet Repelita Kuswijayanti, M.Si. (Indonesia)

ETIKA & PEDOMAN PUBLIKASI BERKALA ILMIAH JURNAL PEREMPUAN

<http://www.jurnalperempuan.org/jurnal-perempuan.html>

Jurnal Perempuan (JP) merupakan jurnal publikasi ilmiah yang terbit setiap tiga bulan dengan menggunakan sistem *peer review* (mitra bestari) untuk seleksi artikel utama, kemudian disebut sebagai Topik Empu. Jurnal Perempuan menguraikan persoalan perempuan dengan telaah teoritis hasil penelitian dengan analisis mendalam dan menghasilkan pengetahuan baru. Perspektif JP mengutamakan analisis gender dan metodologi feminis dengan irisan kajian lain seperti filsafat, ilmu budaya, seni, sastra, bahasa, psikologi, antropologi, politik dan ekonomi. Isu-isu marjinal seperti perdagangan manusia, LGBT, kekerasan seksual, pernikahan dini, kerusakan ekologi, dan lain-lain merupakan ciri khas keberpihakan JP. Anda dapat berpartisipasi menulis di JP dengan pedoman penulisan sebagai berikut:

1. Artikel merupakan hasil kajian dan riset yang orisinal, autentik, asli dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang atau institusi lain. Karya belum pernah diterbitkan sebelumnya.
2. Artikel merupakan hasil penelitian, kajian, gagasan konseptual, aplikasi teori, ide tentang perempuan, LGBT, dan gender sebagai subjek kajian.
3. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia, sejumlah 10-15 halaman (5000-7000 kata), diketik dengan tipe huruf *Calibri* ukuran 12, *Justify*, spasi 1, pada kertas ukuran kwarto dan atau layar *Word Document* dan dikumpulkan melalui alamat email pada (redaksi@jurnalperempuan.com).
4. Sistematika penulisan artikel disusun dengan urutan sebagai berikut: **Judul** komprehensif dan jelas dengan mengandung kata-kata kunci. Judul dan subbagian dicetak tebal dan tidak boleh lebih dari 15 kata. **Nama** ditulis tanpa gelar, institusi, dan alamat email dicantumkan di bawah judul. **Abstrak** ditulis dalam dua bahasa: Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia secara berurutan dan tidak boleh lebih dari 100-150 kata, disertai 3-5 kata kunci. **Pendahuluan** bersifat uraian tanpa subbab yang memuat: latar belakang, rumusan masalah, landasan konseptual, dan metode penelitian. **Metode Penelitian** berisi cara pengumpulan data, metode analisis data, serta waktu dan tempat jika diperlukan. **Pembahasan** disajikan dalam subbab-subbab dengan penjudulan sesuai dalam kajian teori feminisme dan/atau kajian gender seperti menjadi ciri utama JP. **Penutup** bersifat reflektif atas permasalahan yang dijadikan fokus penelitian/kajian/ temuan dan mengandung nilai perubahan. **Daftar Pustaka** yang diacu harus tertera di akhir artikel.
5. Catatan-catatan berupa referensi ditulis secara lengkap sebagai catatan tubuh (*body note*), sedangkan keterangan yang dirasa penting dan informatif yang tidak dapat disederhanakan ditulis sebagai **Catatan Akhir** (*endnote*).
6. Penulisan Daftar Pustaka adalah secara alfabetis dan mengacu pada sistem *Harvard Style*, misalnya (Arivia 2003) untuk satu pengarang, (Arivia & Candraningrum 2003) untuk dua pengarang, (Candraningrum, Dhewy & Pratiwi 2016) untuk tiga pengarang, dan (Arivia et al. 2003) untuk empat atau lebih pengarang. Contoh:
Arivia, G 2003, *Filsafat Berperspektif Feminis*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.
Amnesty International (AI) 2010, *Left Without a Choice: Barriers to Reproductive Health in Indonesia*, diakses pada 5 Maret 2016, http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/AmnestyInternational_for_PSWG_en_Indonesia.pdf
Candraningrum, D (ed.) 2014, *Body Memories: Goddesses of Nusantara, Rings of Fire and Narrative of Myth*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.
Dhewy, A 2014, "Faces of Female Parliament Candidates in 2014 General Election", *Indonesian Feminist Journal*, vol. 2 no. 2, h. 130-147.
"Sukinah Melawan Dunia" 2014, *KOMPAS*, 18 Desember, diakses 20 Desember 2014, <http://nasional.kompas.com/read/2014/12/18/14020061/Sukinah.Melawan.Dunia>
7. Kepastian pemuatan diberitahukan oleh Pemimpin Redaksi dan atau Sekretaris Redaksi kepada penulis. Artikel yang tidak dimuat akan dibalas via email dan tidak akan dikembalikan. Penulis yang dimuat kemudian akan mendapatkan dua eksemplar JP cetak.
8. Penulis wajib melakukan revisi artikel sesuai anjuran dan review dari Dewan Redaksi dan Mitra Bestari.
9. Hak Cipta (*Copyright*): seluruh materi baik narasi visual dan verbal (tertulis) yang diterbitkan JP merupakan milik JP. Pandangan dalam artikel merupakan perspektif masing-masing penulis. Apabila anda hendak menggunakan materi dalam JP, hubungi redaksi@jurnalperempuan.com untuk mendapatkan petunjuk.

YAYASAN
YJP
JURNAL
PEREMPUAN

Jl. Karang Pola Dalam II No. 9A
Jati Padang, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan 12540
INDONESIA
Phone/Fax: +62 21 22701689

MAMPU

Kemitraan Australia - Indonesia
untuk Kesetaraan Gender
dan Pemberdayaan Perempuan



MIGRANT CARE
Perhimpunan Indonesia untuk Buruh Migran Berdaulat

